

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
TAHUN 2019  
PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG  
KELAS II**



Jl. Aipda Muán Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang  
Telp. /Fax. : (0732) 3930019  
E-mail : pn\_kepahiang@yahoo.com Website : www.pn-kepahiang.go.id  
KEPAHIANG - BENGKULU 39172

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
TAHUN 2019  
PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG  
KELAS II



Jl. Aipda Muán Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang  
Telp. /Fax. : (0732) 3930019  
E-mail : pn\_kepahiang@yahoo.com Website : www.pn-kepahiang.go.id  
KEPAHIANG - BENGKULU 39172

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mencurahkan Rahmat dan Nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini telah disusun dan disajikan secara menyeluruh diantara bagian-bagian baik kepaniteraan maupun kesekretariatan. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kepahiang Tahun 2019. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini meskipun jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kepahiang, serta berguna bagi semua pihak.

Kepahiang, 10 Januari 2020  
Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang



**DI. RIMDAN, S.H., M.H.**  
NIP.197302011993031003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GRAFIK .....	vi
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN .....	1
B. RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG .....	3
C. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) .....	5
BAB II.....	9
A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG .....	9
B. PENYELESAIAN PERKARA .....	9
1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS .....	9
2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU.....	12
3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) .....	14
4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI.....	16
5. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI.....	17
C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN).....	19
1. POSBAKUM (POS BANTUAN HUKUM).....	19
2. SIDANG KELILING / PELAYANAN TERPADU.....	20
3. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA).....	20
BAB III. SUMBER DAYA MANUSIA.....	22
A. SUMBER DAYA MANUSIA .....	22
Tabel 14. Tenaga Kontrak/Honorer .....	24
1. MUTASI .....	24
2. PROMOSI .....	24
3. PENSUN.....	25

4. DIKLAT (SDM TEKNIS/NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT) .....	25
BAB IV. PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI .....	27
A. PENGELOLAAN KEUANGAN .....	27
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA .....	31
C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI .....	37
1. IMPLEMENTASI E-COURT DI PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG.....	37
2. IMPLEMENTASI SIPP DI PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG .....	38
BAB V. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....	41
A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU.....	41
B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) .....	42
C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK.....	43
BAB VI. PENGAWASAN .....	44
A. INTERNAL.....	44
B. EVALUASI .....	45
BAB VII. PENUTUP.....	47
A. KESIMPULAN.....	47
B. REKOMENDASI.....	47
LAMPIRAN.....	48

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wilayah Yuridiksi.....	6
Gambar 2. Struktur Organisasi .....	7
Gambar 3. Gedung.....	32
Gambar 4. e-Court Mahkamah Agung.....	38
Gambar 5. e-Court Informasi e-Court.....	38
Gambar 6. Website SIPP .....	40
Gambar 7. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum .....	41
Gambar 8. Meja PTSP .....	42
Gambar 9. Aplikasi PTSP .....	42
Gambar 8. Informasi Perkara Lalu lintas .....	43

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. Sisa Perkara Perdata yang di Putus .....</b>	<b>9</b>
<b>Tabel 2. Sisa Perkara Pidana yang di Putus.....</b>	<b>10</b>
<b>Tabel 3. Perkara Perdata yang Putus Tepat Waktu .....</b>	<b>12</b>
<b>Tabel 4. Perkara Pidana yang Putus Tepat Waktu .....</b>	<b>13</b>
<b>Tabel 5. Upaya Hukum Perkara Perdata .....</b>	<b>15</b>
<b>Tabel 6. Upaya Hukum Perkara Pidana .....</b>	<b>16</b>
<b>Tabel 7. Perkara Mediasi .....</b>	<b>16</b>
Tabel 8. Perkara Anak Diversi .....	18
<b>Tabel 9. Lembaga Bantuan Hukum.....</b>	<b>19</b>
Tabel 10. Posbakum.....	19
Tabel 11. Perkara Prodeos.....	20
Tabel 12. Daftar Perkara Prodeo .....	21
<b>Tabel 13. Hakim dan Pegawai.....</b>	<b>23</b>
Tabel 14. Tenaga Kontrak/Honoror .....	24
<b>Tabel 15. Mutasi Keluar .....</b>	<b>24</b>
<b>Tabel 16. Mutasi Masuk.....</b>	<b>24</b>
<b>Tabel 17. Promosi.....</b>	<b>25</b>
<b>Tabel 18. Pensiun .....</b>	<b>25</b>
<b>Tabel 19. Diklat Teknis .....</b>	<b>25</b>
<b>Tabel 20. Diklat Non Teknis .....</b>	<b>26</b>
<b>Tabel 21. Diklat Non Teknis .....</b>	<b>27</b>
<b>Tabel 22. Diklat Non Teknis .....</b>	<b>28</b>
<b>Tabel 23. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya .....</b>	<b>29</b>
<b>Tabel 24. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung .....</b>	<b>29</b>
<b>Tabel 25. PNBP Umum .....</b>	<b>30</b>
<b>Tabel 26. Program Peningkatan Manajemen Peradilan .....</b>	<b>30</b>
<b>Tabel 27. PNBP Fungsional .....</b>	<b>31</b>
<b>Tabel 28. Gedung dan Fasilitas Perkantoran .....</b>	<b>34</b>
<b>Tabel 29. Aset Tanah.....</b>	<b>34</b>
<b>Tabel 30. Aset Bangunan .....</b>	<b>35</b>
Tabel 31. Kendaraan Dinas .....	36
Tabel 32. Keadaan Perkara Perdata dan Perkara Pidana .....	39
<b>Tabel 33. Rekapitulasi Perkara di Website.....</b>	<b>40</b>
<b>Tabel 34. Hakim Pengawas Bidang.....</b>	<b>44</b>
<b>Tabel 35. Hakim Pengawas Bidang.....</b>	<b>45</b>

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perkara Perdata 2018.....	10
Grafik 2. Perkara Pidana 2017 .....	11
Grafik 3. Perkara Pidana Tanpa Lalu lintas .....	11
Grafik 4. Perkara Pidana Tanpa Lalu lintas .....	12
Grafik 5. Perkara Pidana .....	13
Grafik 6. Perkara Pidana Lalu lintas .....	14
Grafik 7. Upaya Hukum Perkara Perdata.....	15
Grafik 8. Upaya Hukum Perkara Pidana .....	16
Grafik 9. Mediasi.....	17
Grafik 10. Pidana Anak.....	18



## BAB I. PENDAHULUAN

### A. KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN

Pengadilan Negeri Kepahiang sebagai salah satu Badan Peradilan Tingkat Pertama mempunyai tugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata. Di samping tugas pokok tersebut masih ada tugas-tugas lain yang oleh peraturan perundang-undangan yang dibebankan kepada Pengadilan Negeri untuk pelaksanaannya. Tugas-tugas tersebut antara lain Non Yudisial, administrasi, umum dan pendukung kedinasan antara lain, KORPRI, Forum Pimpinan Daerah, IKAHI, Dharmayukti, Koperasi Pegawai, Olahraga dan lain sebagainya.

Dalam menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dilakukan dengan menginventarisir lebih dahulu kondisi kantor yang ada baik personilnya maupun keadaan administrasinya serta kondisi fisik gedungnya dengan menyadari adanya kendala - kendala yang ada antara lain keterbatasan personil, ruang dan fasilitas lainnya. Kondisi yang ada tersebut diusahakan untuk dibenahi dan ditingkatkan dengan cara penataan dan menjaga kebersihan kantor, ketertiban budaya kerja pegawai dan penataan administrasi menjadi lebih baik, tertib, rapi dan teratur. Di samping itu dalam hal peningkatan proses penanganan perkara ditargetkan proses penyelesaiannya tidak lebih dari 6 (enam) bulan dengan tidak mengesampingkan kualitas isi putusan.

Sebagai acuan untuk menata administrasi kantor adalah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam surat keputusan, surat edaran dan instruksi dari pejabat yang berwenang. Sedangkan dalam penataan administrasi perkara berpedoman pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi serta Buku Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan dalam tahapan jangka pendek dan menengah, namun apabila dalam jangka waktu tersebut belum dapat dilaksanakan maka usaha pembenahan akan dilakukan secara kontinyu dilaksanakan dalam tahapan berikutnya, demikian seterusnya sampai tujuan akhir dapat diwujudkan.

Sasaran akhir dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah keadaan kantor dan administrasi yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan/kebutuhan, yaitu :

- 1) Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
- 2) Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN.

- 3) Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan tersruktur.
- 4) Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proposional.
- 5) Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.
- 6) Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan professional.
- 7) Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
- 8) Berorientasi pada pelayanan publik yang prima
- 9) Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
- 10) Modern dengan berbasis TI terpadu.

Selain hal diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan Agenda Pembaruannya, maka di Pengadilan Negeri Kepahiang mempunyai program prioritas, antara lain adalah:

- 1) Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Dengan adanya SK KMA 144/2007 maka pada Pengadilan Negeri Kepahiang telah berjalannya website dengan alamat : [www.pn-kepahiang.go.id](http://www.pn-kepahiang.go.id) dan terus diperbaharui. Pengadilan Negeri Kepahiang juga telah menyediakan Desk Info yang terletak diruang tunggu. Desk Info berisi informasi, jadwal sidang, biaya perkara dan pengumuman seputar Pengadilan Negeri Kepahiang. Selain itu dengan program penelusuran perkara telah ada program SIPP untuk mendukung program penelusuran perkara.

- 2) Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan.

Pada program ini Pengadilan Negeri Kepahiang telah menyediakan meja informasi walaupun dengan sarana yang masih terbatas, selain itu juga telah tersedia meja pengaduan dimana meja informasi dan pengaduan ini berada di bawah tanggung jawab Panitera Muda Hukum.

Pengadilan Negeri Kepahiang sebagai salah satu perpanjangan tangan dari Mahkamah Agung mempunyai visi kelembagaan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, adapun Visi Misi pada Pengadilan Negeri Kepahiang yaitu :

## **Visi**

### ***Terwujudnya Pengadilan Negeri Kepahiang Yang Agung***

Adapun Misi Pengadilan Negeri Kepahiang sesuai dengan misi Mahkamah Agung yaitu :

## **Misi**

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kepahiang
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Kepahiang.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Kepahiang.

## **B. RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG**

Mahkamah Agung dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Mahkamah Agung menetapkan enam sasaran strategis yang terdiri dari:

- a. Internalisasi visi, misi dan nilai-nilai.
- b. Melanjutkan penyelesaian agenda reformasi birokrasi, utamanya adalah penguatan organisasi melalui restrukturisasi organisasi, pengembangan tata laksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM.
- c. Melanjutkan upaya mewujudkan modernisasi pengadilan.
- d. Menyelesaikan tunggakan perkara.
- e. Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan.
- f. Kemandirian anggaran.

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Kepahiang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Pengadilan Negeri Kepahiang membuat usulan program yang dilaksanakan. Adapun program tersebut adalah:

### **a) Program Penyelesaian perkara**

Salah satu isu yang selalu mengemuka di masyarakat mengenai Badan Peradilan terutama Pengadilan Negeri Kepahiang adalah tumpukan perkara. Pengadilan Negeri Kepahiang telah melakukan serangkaian upaya untuk mengatasi penumpukan perkara, namun jumlah perkara baru yang masuk setiap tahunnya selalu meningkat. Oleh karena itu dipandang perlu untuk membuat program peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Kepahiang. Tingkat penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Kepahiang tidak hanya disebabkan oleh faktor kemampuan para hakim dalam memeriksa dan memutus

perkara, namun juga masalah minutasasi dan informasi perkara serta adanya pelimpahan perkara dari kejaksaan pada akhir tahun yang merupakan bagian dari permasalahan terkait dengan penyelesaian perkara ini. Hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi masyarakat pencari keadilan. Maka dari itu upaya peningkatan dan pengefektifan penyelesaian perkara harus dilakukan. Program ini juga sejalan dengan prioritas RPJMN dalam hal peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum.

**b) Program Peningkatan Manajemen**

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan umum yang melaksanakan tugas pokok pengadilan umum. Pengadilan Negeri Kepahiang berusaha secara maksimal memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya.

**c) Program Pendidikan dan Pelatihan**

Keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengadilan sangat ditentukan dari bagaimana lembaga tersebut mempersiapkan aparatnya dengan pendidikan dan pelatihanyang memadai. Pada sisi yang lain, pengembangan kapasitas lembaga juga sangat dipengaruhi oleh hasil penelitian yang memadai untuk meningkatkan kemampuan dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur pengadilan yang didukung dengan hasil penelitian yang memadai diharapkan akan menghasilkan lembaga peradilan yang kuat dan berwibawa. Hal ini sejalan dengan prioritas RPJMN yaitu dalam rangka Peningkatan Profesionalisme Aparat Hukum serta Peningkatan Pelayanan Hukum dan Bantuan Hukum kepada Masyarakat.

**d) Program Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.**

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus dukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

**e) Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara.**

Peningkatan sarana dan prasaran aparatur diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Kepahiang dalam mendukung

pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri Kepahiang dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan.

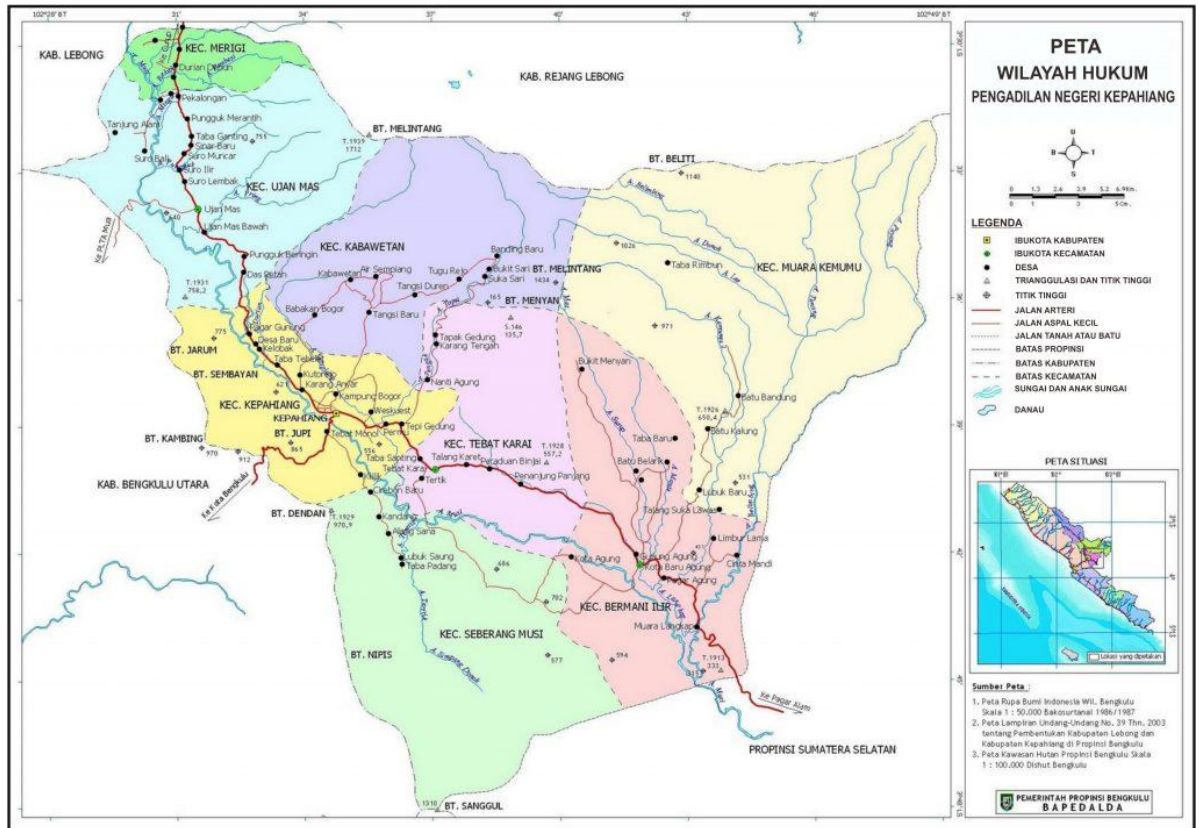
Sarana dan prasarana baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan maupun untuk kebutuhan aparaturnya Pengadilan.

**f) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara.**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan agar sebuah lembaga peradilan dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Melalui fungsi pengawasan ini diharapkan kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat dengan segera diatasi. Fungsi pengawasan tidak dapat dilihat secara sempit yaitu dalam hal mengawasi individu aparaturnya pengadilan dalam melaksanakan tugasnya. Namun pengawasan terhadap kesiapan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu untuk fungsi pengawasan ini harus dilakukan oleh seorang pengawas yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang tinggi. Fungsi pengawasan yang berjalan dengan baik dan didukung oleh aparaturnya pengawasan yang berintegritas akan dalam mewujudkan prioritas di dalam RPJMN yaitu dalam hal penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia.

### **C. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)**

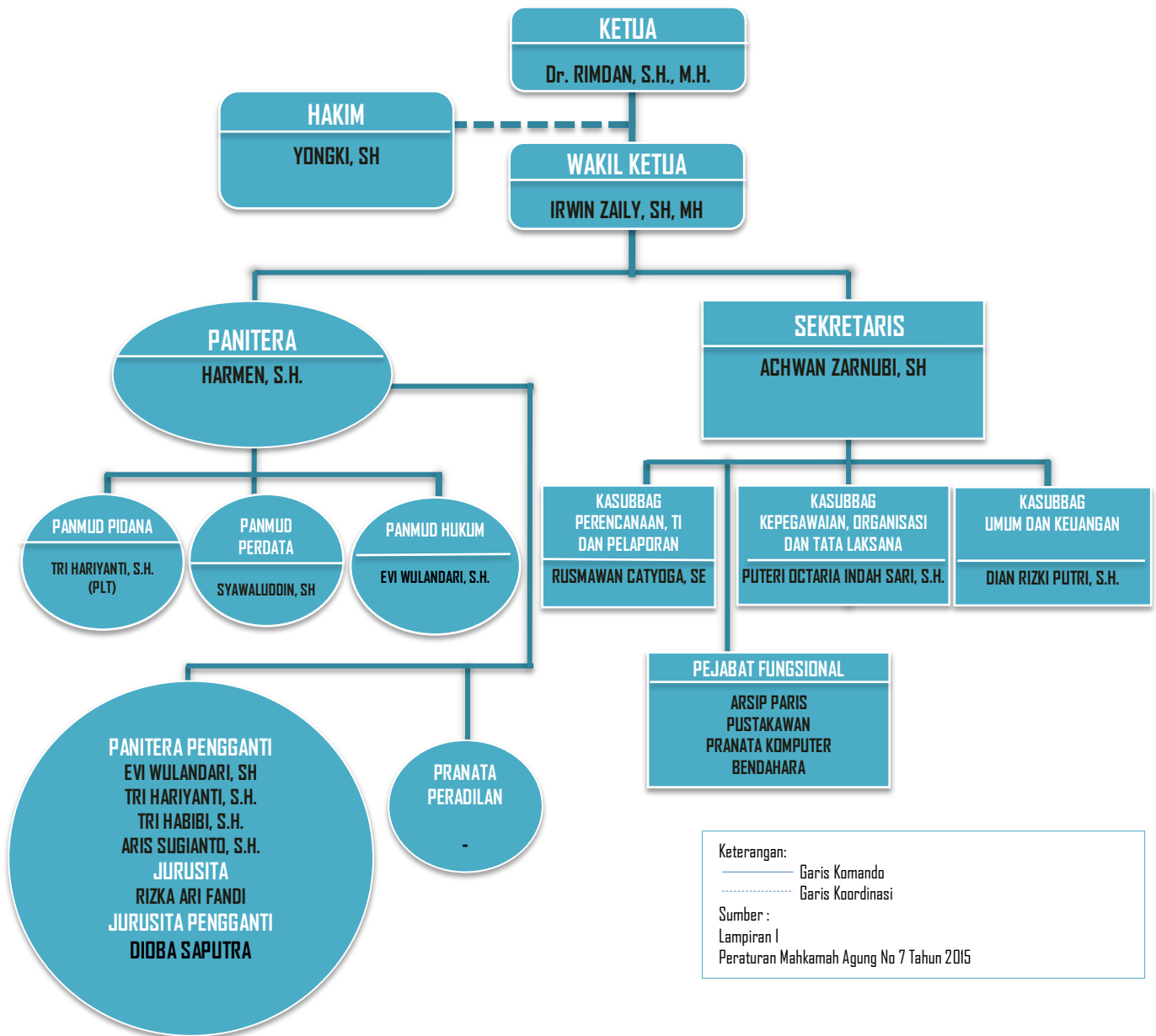
Pengadilan Negeri Kepahiang merupakan pengadilan tingkat pertama peradilan umum dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Kepahiang sebagai kawal depan (voorj post) Mahkamah Agung RI, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama dengan daerah hukum meliputi Kabupaten Kepahiang.



Gambar 1. Wilayah Yuridiksi

Pengadilan Negeri Kepahiang dipimpin oleh seorang Ketua, dibantu Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Bidang Kepaniteraan, Subbag Bidang Kesekretariatan, Panitera Pengganti, Jurusita dan Staf. Secara struktur organisasi Pengadilan Negeri Kepahiang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2. Struktur Organisasi



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang adalah aparatur tata usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan yang dipimpin oleh Panitera.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang terdiri dari Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana dan Kepaniteraan Hukum.

- Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

- Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.
- Panitera muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Kesekretaritan Pengadilan Negeri Kepahiang adalah aparatur tata usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Kesekretariaan Pengadilan Negeri Kepahiang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kepahiang.

Kesekretariat Pengadilan Negeri Kepahiang terdiri dari Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Subbagian Umum dan Keuangan.

- Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, pengelolaan teknologi informasi dan statistik serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
- Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
- Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat-menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.



## BAB II.

### A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke- IV), kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan- badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945). Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya). Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2). Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986).

### B. PENYELESAIAN PERKARA

#### 1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Sampai dengan 31 Desember 2019, jumlah sisa perkara yang diputus di Pengadilan Negeri Kepahiang berjumlah 28 perkara, yakni dari sisa perkara perdata 1 perkara dan dari sisa perkara pidana 27.

##### a. Perkara Perdata

NO	KLASIFIKASI PERKARA	SISA PERKARA 2018	MASUK 2019	SISA PERKARA PUTUS 2019	SISA PERKARA 2019
1	2	3		6	7
1	Perdata Gugatan	-	5	4	1
2	Perdata Permohonan	1	50	51	-
3	Gugatan Sederhana	-	2	2	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>1</b>

**Tabel 1. Sisa Perkara Perdata yang di Putus**

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada tahun 2019, Pengadilan Negeri Kepahiang menangani perkara perdata sebanyak 57 perkara terdiri dari sisa perkara tahun 2018 sebanyak 1 perkara dari Perdata Permohonan dan perkara masuk 57 perkara.
2. Dari 1 sisa perkara perdata yang ditangani, berhasil diselesaikan di tahun 2019 sebanyak 1 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian sisa perkara perdata mencapai 100 %.

Berikut keadaan Sisa Perkara Perdata Pengadilan Negeri Kepahiang yang disajikan dalam bentuk grafik :



Grafik 1. Perkara Perdata 2019

#### b. Perkara Pidana

NO	KLASIFIKASI PERKARA	SISA PERKARA 2018	MASUK 2019	SISA PERKARA PUTUS 2019	SISA PERKARA 2019
1	2	3		4	7
1	Pidana Biasa	26	144	140	30
2	Pidana Singkat	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	1	1	-
4	Pidana Anak	1	9	10	-
	<b>Jumlah</b>	<b>27</b>	<b>154</b>	<b>151</b>	<b>30</b>
5	Pidana Lalu-Lintas	-	2055	2055	-
	<b>Jumlah</b>	<b>27</b>	<b>3.257</b>	<b>20</b>	<b>-</b>

Tabel 2. Sisa Perkara Pidana yang di Putus

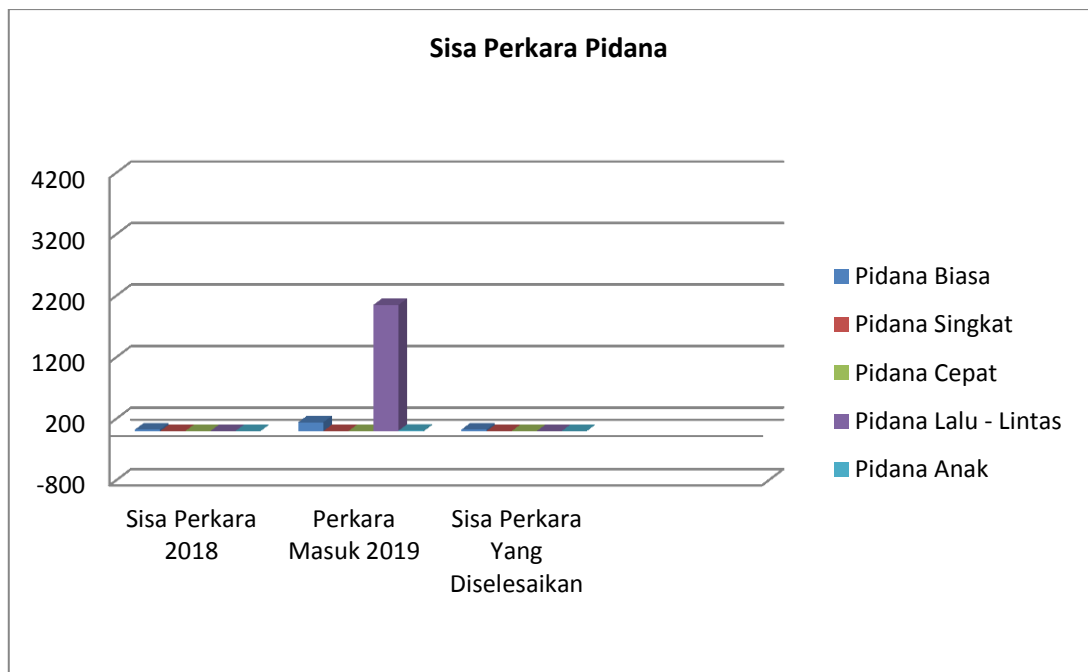
Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada tahun 2019, Pengadilan Negeri Kepahiang menangani perkara pidana sebanyak 181 perkara terdiri dari sisa perkara tahun 2018 sebanyak 27 perkara

dan perkara masuk 2019 sebanyak 154 perkara, dimana 2.055 perkara merupakan perkara pidana lalu-lintas.

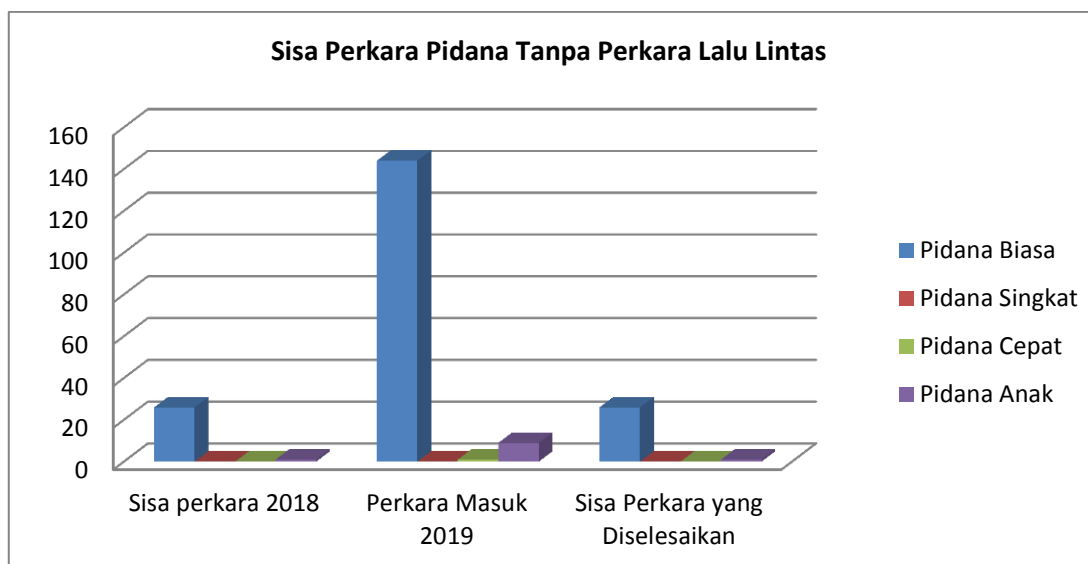
2. Dari 27 sisa perkara pidana yang ditangani, berhasil diselesaikan di tahun 2019 sebanyak 27 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian sisa perkara pidana 100 %.

Berikut keadaan Sisa Perkara Pidana Pengadilan Negeri Kepahiang yang disajikan dalam bentuk grafik :



Grafik 2. Perkara Pidana 2019

Penyelesaian Perkara Pidana Tanpa Perkara Lalu – Lintas



Grafik 3. Perkara Pidana Tanpa Lalu lintas

## 2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Pada tahun 2019, jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu berjumlah 2.263 perkara, yakni dari perkara perdata ada 57 perkara dan perkara pidana sebanyak 2.206 perkara dimana 2.055 perkara berasal dari perkara lalu lintas.

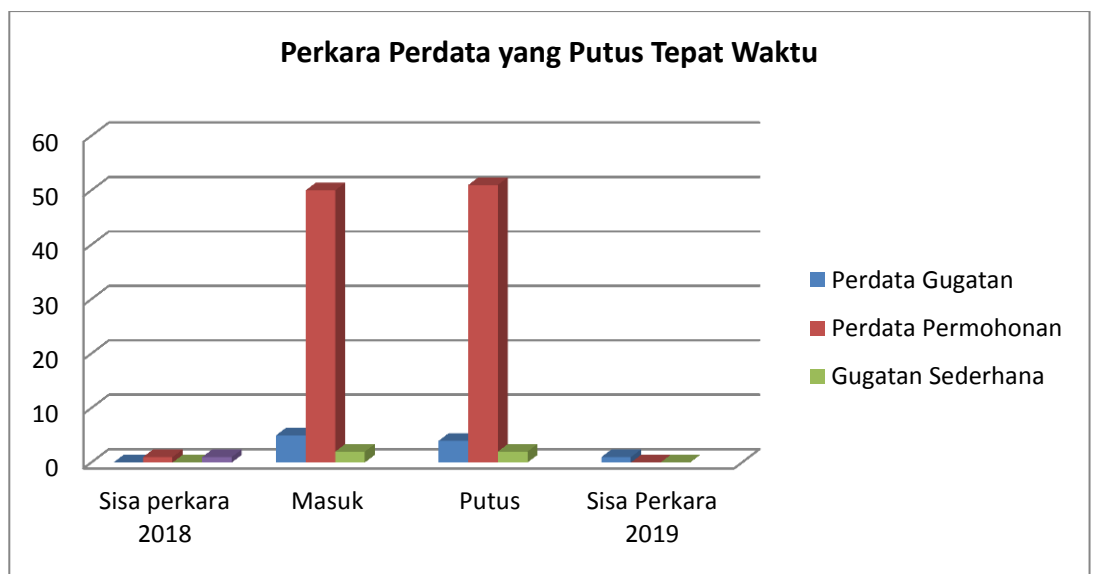
### a. Perkara Perdata

Berdasarkan tabel di dibawah, dapat dilihat persentase perkara yang diputus tepat waktu. Pada tahun 2019, ada sebanyak 57 perkara perdata yang diputus tepat waktu yakni dari 58 perkara perdata yang ditangani, 4 Perkara dari Perkara Perdata Gugatan, 51 perkara dari Perkara Perdata Permohonan dan 2 perkara dari Gugatan Sederhana dengan tingkat penyelesaian 98,27 %.

**Grafik Penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu**

NO	NAMA	SISA PERKARA 2018	JUMLAH PERKARA TAHUN 2019		SISA PERKARA 2019	PUTUS TEPAT WAKTU
			MASUK	PUTUS		
1	2	3	4	5		6
1	Perdata Gugatan	-	5	4	-	4
2	Perdata Permohonan	1	50	51	-	51
3	Gugatan Sederhana	-	2	2	-	2
	Jumlah	1	57	57		57

**Tabel 3. Perkara Perdata yang Putus Tepat Waktu**



**Grafik 4. Perkara Perdata yang Putus Tepat Waktu**

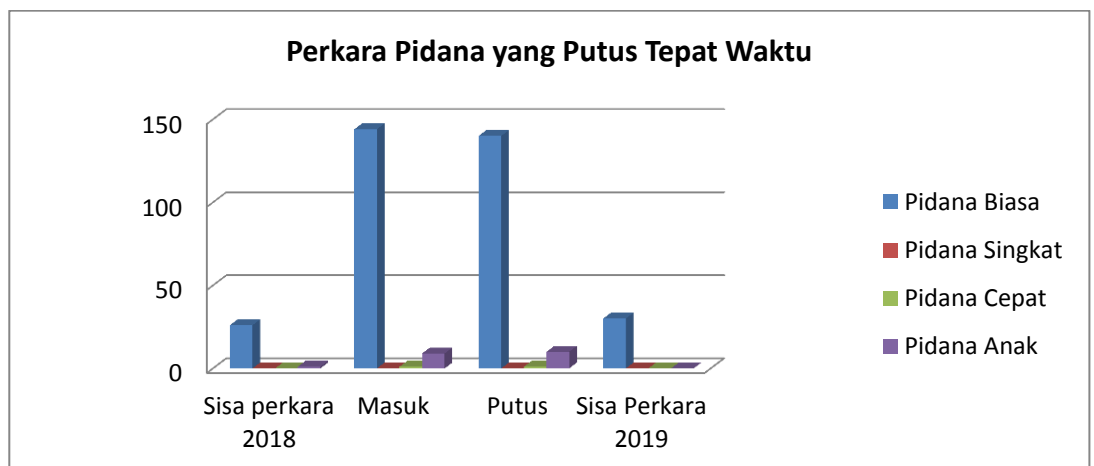
### b. Perkara Pidana

Berdasarkan tabel di dibawah, dapat dilihat persentase perkara yang diputus tepat waktu. Pada tahun 2019, ada sebanyak 151 perkara pidana yang diputus tepat waktu, terdiri dari Pidana Biasa 140 Perkara, Pidana Cepat 1 Perkara, Pidana Anak 10 Perkara dimana dari 181 perkara pidana yang ditangani terdapat sisa perkara tahun 2018 sebanyak 27 perkara dan perkara masuk sebanyak 154 perkara dengan tingkat penyelesaian 83,42 % , untuk perkara lalu-lintas persentase perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2019, ada sebanyak 2.055 perkara pidana lalu lintas yang diputus tepat waktu dari 2.055 perkara lalu lintas yang masuk dengan tingkat penyelesaian 100 %.

NO	NAMA	SISA PERKARA 2018	JUMLAH PERKARA TAHUN 2019		SISA PERKARA 2019	PUTUS TEPAT WAKTU
			MASUK	PUTUS		
1	2	3	4	5		6
1	Pidana Biasa	26	144	140	30	-
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	1	1	-	
4	Pidana Anak	1	9	10	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>27</b>	<b>154</b>	<b>151</b>	<b>30</b>	
4	Pidana Lalu-Lintas	-	2055	2055	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>2209</b>	<b>2206</b>	<b>-</b>	

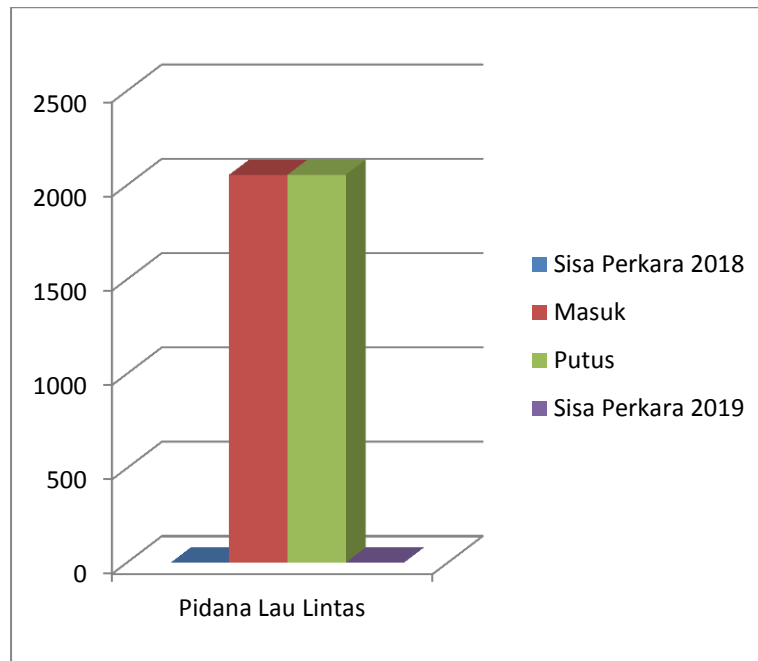
Tabel 4. Perkara Pidana yang Putus Tepat Waktu

**Penyelesaian Perkara Pidana Tanpa Perkara Lalu – Lintas**



Grafik 5. Perkara Pidana

**Grafik Penyelesaian Perkara Pidana dengan Perkara Lalu – Lintas**



Grafik 6. Perkara Pidana Lalu lintas

### 3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)

Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum sebanyak 149 Perkara dari 158 Perkara Pidana dan Perdata yang diselesaikan (tidak termasuk perkara lalu lintas). Jumlah Perkara yang mengajukan Upaya Hukum pada tahun 2017 sebanyak 9 perkara dari Perkara Pidana.

#### a. Perkara Perdata

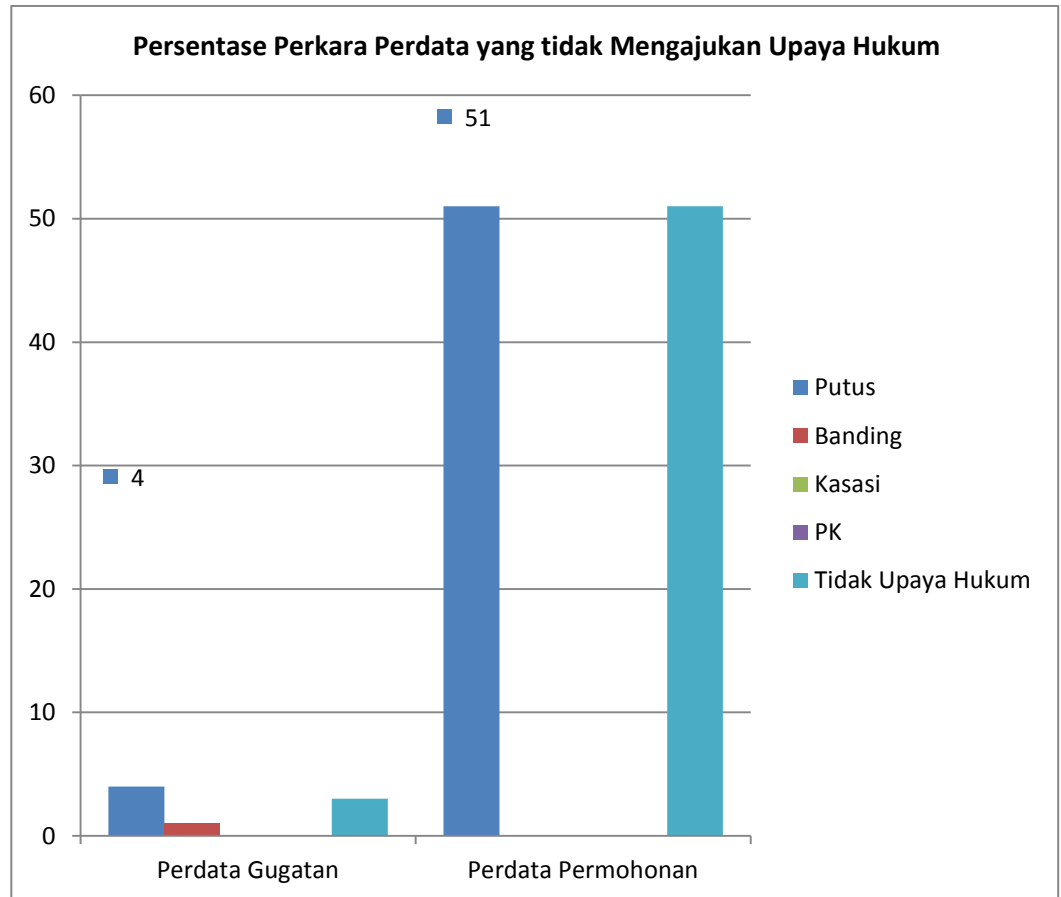
Dari 55 perkara perdata yang diputus tahun 2019 terdapat 1 perkara yang mengajukan upaya hukum dari Perkara Gugatan. Sehingga dapat disimpulkan, jumlah perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK adalah sebanyak 54 perkara terdiri dari Perkara Perdata Gugatan 3 perkara, Perdata Permohonan 51 Perkara atau sebesar 98,18 %.

Berikut tabel dan grafik Perkara Perdata yang mengajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali :

NO	KLASIFIKASI PERKARA	PUTUS	BANDING	KASASI	PK	TIDAK UPAYA HUKUM
1	2		4	6		7
1	Perdata Gugatan	4	1	-	-	3

2	Perdata Permohonan	51	-	-	-	51
	<b>Jumlah</b>	<b>55</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54</b>

Tabel 5. Upaya Hukum Perkara Perdata



Grafik 7. Upaya Hukum Perkara Perdata

**b. Perkara Pidana**

Berdasarkan tabel berikut, dari 150 perkara pidana yang diputus tahun 2019 ada 10 perkara yang mengajukan upaya hukum, yakni dari 10 Perkara Pidana Biasa yang mengajukan upaya hukum 8 perkara mengajukan upaya hukum banding dan 2 perkara mengajukan upaya hukum Kasasi dan jumlah perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebanyak 140 perkara atau sebesar 93,33 %.

**Upaya Hukum Perkara Pidana**

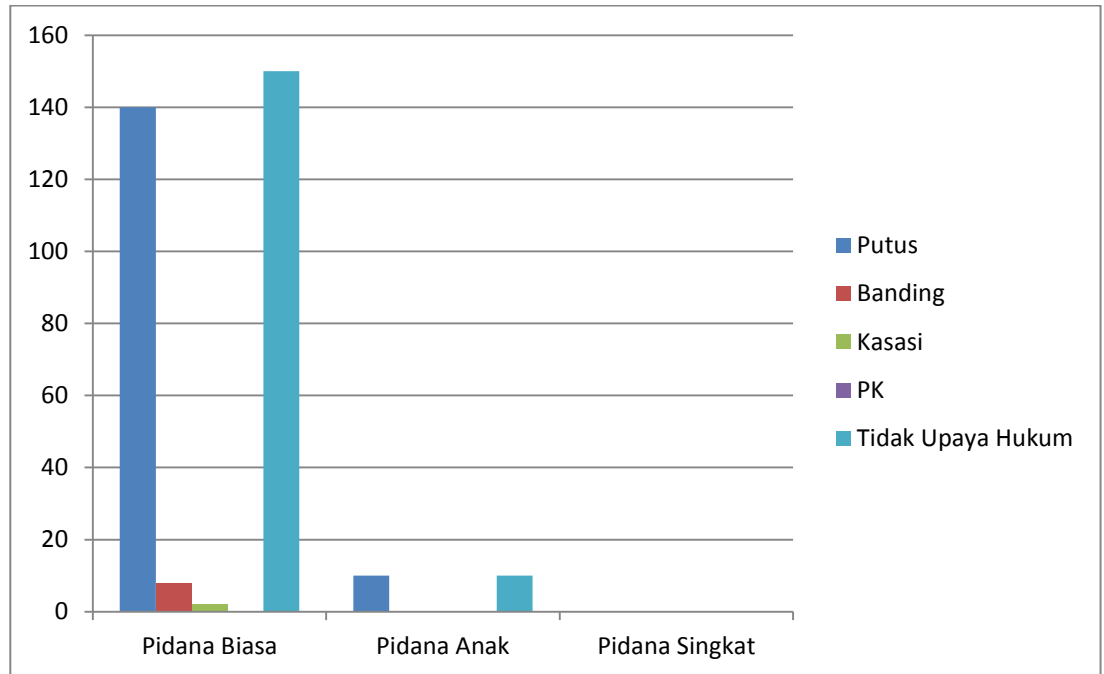
NO	KLASIFIKASI PERKARA	PUTUS	BANDING	KASASI	PENINJAUAN KEMBALI (PK)	TIDAK UPAYA HUKUM
1	2		4	6	7	
1	Pidana Biasa	140	8	2	-	130

2	Pidana Anak	10	-	-	-	10
3	Pidana Singkat		-	-	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>150</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>140</b>

**Tabel 6. Upaya Hukum Perkara Pidana**

Berikut grafik Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali (Pk)Upaya Hukum :

**Upaya Hukum Perkara Pidana**



**Grafik 8. Upaya Hukum Perkara Pidana**

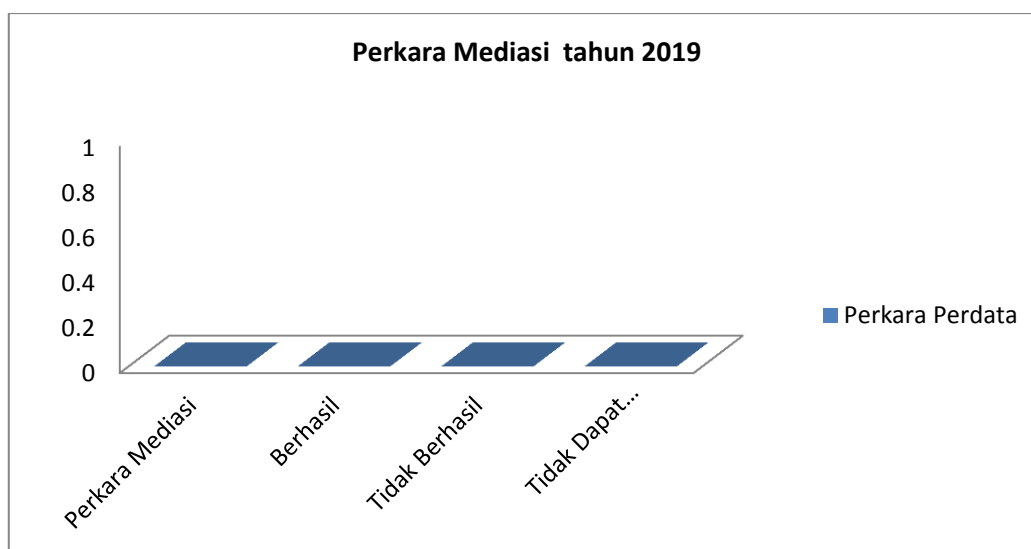
**4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI**

Pada tahun 2019, tidak terdapat perkara perdata yang berhasil di mediasi dari 5 perkara Perdata Gugatan tidak terdapat perkara yang di mediasi sehingga capaian untuk perkara perdata yang berhasil di mediasi sebesar 0 %

NO	KLASIFIKASI PER JENIS PERKARA	JUMLAH PERKARA MEDIASI		BERHASIL	TIDAK BERHASIL	TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN
		SISA TAHUN LALU	TAHUN BERJALAN			
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	-	-	-	-	-

**Tabel 7. Perkara Mediasi**





Grafik 9. Mediasi

## 5. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI

Pada tahun 2019, dari 9 perkara anak yang masuk dan 9 perkara anak yang putus tidak terdapat perkara anak yang berhasil melalui diversifikasi atau perkara anak yang tidak diversifikasi sebanyak 9 perkara, selengkapnya pada tabel Perkara Anak Diversifikasi Berikut:

NO	KLASIFIKASI PERKARA	SISA TAHUN LALU	JUMLAH PERKARA TAHUN 2019		SISA PERKARA 2019	HASIL DIVERSI		
			MASUK	PUTUS		BERHASIL	TIDAK BERHASIL	TIDAK DIVERSI
1			2		3		4	
1	Kesusilaan	-	-	-	-	-	-	-
2	Penganiyaan	-	2	2	-	-	-	2
3	Pencurian		6	6	-	-	-	6
4	Penggelapan	-	-	-	-	-	-	-
5	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	-	-	-	-	-	-	-
6	Narkotika	-	-	-	-	-	-	-
7	Perlindungan Anak		1	1				1
8	Kekerasan Dalam Rumah	-	-	-	-	-	-	-
9	Kejahatan	-	-	-	-	-	-	-

	yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang atau Barang							
	<b>Jumlah</b>	-	9	9	-	-	-	9

Tabel 8. Perkara Anak Diversi

Berikut grafik perkara anak yang berhasil melalui diversi :

**Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi**



Grafik 10. Pidana Anak

### C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

#### 1. POSBAKUM (POS BANTUAN HUKUM)

Untuk mengimplementasikan Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009 pasa 57 jo. Undang – Undang Bantuan Hukum nomor 16 tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014 sebagai bagian dari Pelayanan Publik yang tugas dan fungsinya untuk :

- a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
- c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau Organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Pengadilan Negeri Kepahiang salah satu satuan kerja yang mendapat alokasi dana Posbakum (Pos Bantuan Hukum) pada Dipa 03 Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.24.000.000,-. Anggaran ini digunakan untuk membantu masyarakat yang ingin mendapatkan layanan bantuan hukum secara gratis. Dengan Posbakum diharapkan adanya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Kepahiang.

Pengadilan Negeri Kepahiang membentuk Posbakum Pengadilan Negeri Kepahiang dengan melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), kerjasama ini dilaksanakan dengan LKBH Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup.

NO	NAMA	LEMBAGA
1	2	3
1	M. Gunawan, S.H.	LKBH Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup

Tabel 9. Lembaga Bantuan Hukum

Berikut jumlah pelayanan Posbakum (Pos bantuan Hukum) yang telah dilaksanakan selama tahun 2019 :

#### JUMLAH LAYANAN POSBAKUM TA. 2019

NO	LEMBAGA	JENIS LAYANAN	LAYANAN
1	2	3	4
1	LKBH Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup	- Penyediaan Informasi - Konsultasi - Advice Hukum	244 Layanan
	TOTAL LAYANAN		244 Layanan

Tabel 10. Posbakum

Pada tahun 2019, sudah terlaksana sebanyak 244 layanan dari Posbakum yakni dari LKBH Muhammadiyah Bengkulu sebanyak 244 Layanan, dengan jenis

layanan berupa Penyediaan Informasi, Konsultasi dan Advice Hukum, dan dari anggaran Posbakum yang diberikan yaitu sebesar Rp24.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp24.000.000,- atau sebesar 100 %.

## 2. SIDANG KELILING / PELAYANAN TERPADU

Pemberlakuan Meja informasi melalui petugas meja informasi serta penerapan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dilakukan untuk memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan, sehingga jadwal dan waktu persidangan lebih cepat dan lebih jelas. Pihak-pihak yang terkait dengan persidangan, yaitu Jaksa, Penasehat Hukum/Advokat, Penggugat, Tergugat, maupun para saksi melapor ke Meja Informasi, yang selanjutnya oleh petugas Meja Informasi perkara yang telah lengkap pihaknya akan dipanggil untuk bersidang.

## 3. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)

Pengadilan Negeri Kepahiang mendapat alokasi anggaran untuk Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara sebesar Rp. 870.000 sebagai pagu awal kemudian direvisi menjadi Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk penambahan Perkara Prodeo dan yang telah direalisasikan sebesar Rp. 1.404.000,- (satu juta empat ratus empat ribu) atau 85,09 %.

Untuk TA. 2019 pada Pengadilan Negeri Kepahiang terdapat 9 (sembilan) Perkara Prodeo pada Perkara Perdata yakni Perdata Permohonan dengan jenis permohonan Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran. Berikut tabel Perkara Prodeo pada Pengadilan Negeri Kepahiang :

TABEL PERKARA PRODEO

NO	KLASIFIKASI PERKARA	JENIS PERMOHONAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	Perdata Permohonan	Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran	9
	Total		9

Tabel 11. Perkara Prodeos

Berikut daftar perkara prodeo pada Pengadilan Negeri Kepahiang selama tahun 2019 :

DAFTAR PERKARA PRODEO PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG

NO	NOMOR PERKARA	NAMA PEMOHON	KETERANGAN
1	9/Pdt.P/2019/PN Kph	EVI SUKAISI	
2	34/Pdt.P/2019/PN Kph	PALUPI	
3	38/Pdt.P/2019/PN Kph	TARYANTO	

7	39/Pdt.P/2019/PN Kph	SUTARNO	
5	42/Pdt.P/2019/PN Kph	APIMAN	
6	43/Pdt.P/2019/PN Kph	DARWIN	
7	44/Pdt.P/2019/PN Kph	EPI SULASTRI	
8	45/Pdt.P/2019/PN Kph	HAVIS PHATONAH	
9	49/Pdt.P/2019/PN Kph	AJI BAMBANG IRAWAN	

Tabel 12. Daftar Perkara Prodeo

## BAB III. SUMBER DAYA MANUSIA

### A. SUMBER DAYA MANUSIA

Pembinaan Sumber Daya Manusia merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk menjadikan SDM yang lebih baik. Pembinaan terhadap Hakim dan Pegawai di Pengadilan Negeri Kepahiang dilakukan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

1. Mengadakan rapat berjenjang rutin bulanan, mulai dari rapat internal bagian kepaniteraan, rapat internal setiap sub bagian kesekretariatan, rapat kepaniteraan, rapat kesekretarian, dan rapat pimpinan (4 Pilar). Rapat berjenjang ini dilaksanakan setiap minggu pertama setiap bulannya.
2. Mengadakan rapat pengawasan dan pembinaan rutin bulanan, mulai dari rapat pengawasan dan pembinaan bagian kepaniteraan, rapat pengawasan dan pembinaan setiap sub bagian kesekretariatan, rapat pengawasan dan pembinaan kepaniteraan, rapat pengawasan dan pembinaan kesekretarian,. Rapat pengawasan dan pembinaan ini dilaksanakan setiap minggu pertama setiap bulannya.
3. Mengadakan rapat rutin bulanan, serta rapat pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang. Rapat ini dilaksanakan setiap minggu kedua setiap bulannya.

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Kepahiang hingga Desember 2019 yakni sebagai berikut :

#### a. Hakim dan Pegawai

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT / GOLONGAN	PENDIDIKAN
1	2	3	5	
<b>I</b>	<b>Pengadilan Negeri Kepahiang</b>			
1.	Dr. RIMDAN, S.H., M.H.	Ketua	Pembina Tk. I / IV/b	S3
2.	IRWIN ZAILY, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Pembina / IV/a	S2
3.	YONGKI, S.H.	Hakim	Hakim Pratama Madya III/c	S1
4.	HARMEN, S.H.	Panitera	Penata Tk. I / III/d	S1
5.	ACHWAN ZARNUBI, S.H.	Sekretaris	Penata / III/c	S1
6.	SYAWALUDDIN, S.H.	Panmud Perdata	Penata / III/c	S1
7.	EVI WULANDARI, S.H.	Panmud Hukum	Penata Muda	S1

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT / GOLONGAN	PENDIDIKAN
1	2	3	5	
			Tk. I / III/b	
8.	RUSMAWAN CATYOGA, S.H.	Kasub Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penata Muda Tk. I / III/b	S1
9.	PUTERI OCTARIA INDAH SARI, S.H.	Kasub Kepegawaian dan Ortala	Penata Muda Tk. I / III/b	S1
10.	DIAN RIZKI PUTRI, S.H.	Kasub Umum dan Keuangan	Penata Muda Tk. I / III/b	S1
11.	ARIS SUGIANTO, S.H.	Panitera Pengganti	Penata Muda Tk. I III/b	S1
12.	AKHMAD TRI HABIBI,S.H.	Panitera Pengganti	Penata Muda Tk. I III/b	S2
13.	TRI HARIYANTI, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Penata Muda Tk. I III/b	S2
14.	RIZKA ARI FANDI	Juru Sita	Pengatur II/c	SMA
15.	DIOBA SAPUTRA	Juru Sita Pengganti	Pengatur II/c	SMA
16.	YURIS PRAWIRATAMA, S.H.	Staf Pidana	Penata Muda Tk. I III/b	S1
17.	YEYEN KURNIADI, S.H.	Staf Pidana	Penata Muda Tk. I III/b	S1
18.	TEMY EKA PUTRA	Staf Subbag Umum dan Keuangan	Pengatur Muda Tk. I II/b	SMA
19.	TIA NURTIHANA, S.Psi.	CPNS/Staf Perdata	Penata Muda/III/a	S1
20.	RIZKI FEBRIANTI, S.H.	PNS/CAKIM	Penata Muda/III/a	S1
21.	TIOMINAR MANURUNG, S.H.	PNS/CAKIM	Penata Muda/III/a	S1
22.	ANTON ALEXANDER, S.H.	PNS/CAKIM	Penata Muda/III/a	S1
23.	EMMA YOSEPHINE SINAGA, S.H.	PNS/CAKIM	Penata Muda/III/a	S1

Tabel 13. Hakim dan Pegawai

## b. Tenaga Kontrak/Honorer

NO	NAMA	TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Pengadilan Negeri Kepahiang		

1.	AKMAL YUSUF, S.KOM.I.	Pramubakti	Tenaga Kontrak
2.	YASIR ARAFAT	Pramubakti	Tenaga Kontrak
3.	VINA OKTAVIANI	Pramubakti	Tenaga Kontrak
4.	ARIS MUNANDAR	Satpam	Tenaga Kontrak
5.	MUHAMMAD IKHSAN GUSTIAN	Satpam	Tenaga Kontrak
6.	DWIPAYANA DARISMAN PUTRA, S.Sos.	Supir	Tenaga Kontrak

Tabel 14. Tenaga Kontrak/Honoror

## 1. MUTASI

- a) Pada tahun 2019 terdapat 5 Pegawai yang Mutasi Keluar dari Pengadilan Negeri Kepahiang yakni :

NO	NAMA	SEBELUMNYA	MUTASI KE
1	2	5	
1.	AK BAGUS INDARYANTO, S.H.	Panitera Muda Pidana PN Kepahiang Kelas II	Mutasi ke PN Curup
2.	HATTA THALIB, S.H., M.H.	Panitera PN Kepahiang Kelas II	Mutasi ke PN Blambangan Umpu
3.	ENDANG WINARTI, A.Md	Fungsional Umum dan Keuangan PN Kepahiang Kelas II	Mutasi ke PN Simalungun
4.	YULIA MARHAENA, S.H.	Hakim PN Kepahiang Kelas II	Mutasi ke PN Lubuk Linggau
5.	YOSSO WIDIYANTORO EKO SAPUTRO	Jurusita PN Kepahiang Kelas II	Mutasi ke PN Tanjung Pinang

Tabel 15. Mutasi Keluar

- b) Pada tahun 2019 terdapat 2 Pegawai yang Mutasi Masuk ke Pengadilan Negeri Kepahiang, yakni :

NO	NAMA	MUTASI DARI	TMT
1	2	5	6
1.	HARMEN, S.H.	Panitera PN Lubuk Linggau	Panitera PN Kepahiang Kelas II
2.	TIA NURTIHANA, S.Psi.	CPNS	Pelaksana Keganiteraan Perdata PN Kepahiang Kelas II

Tabel 16. Mutasi Masuk

## 2. PROMOSI

Pada tahun 2019 terdapat Pegawai di Pengadilan Negeri Kepahiang yang dipromosikan memangku jabatan tertentu di Pengadilan Negeri lain, yakni :



NO	NAMA	JABATAN SEBELUMNYA	JABATAN BARU
1	2	3	4
1.	AK BAGUS INDARYANTO, S.H.	Panitera Muda Pidana PN Kepahiang Kelas II	Panitera Muda Pidana PN Curup Kelas I B
2.	ENDANG WINARTI, A.Md.	Staf Umum dan Keuangan PN Kepahiang Kelas II	Staf Umum dan Keuangan PN Kepahiang Kelas I B
3.	YULIA MARHAENA, S.H.	Hakim PN Kepahiang Kelas II	Hakim PN Lubuk Linggau Kelas I B
4.	YOSSO WIDIYANTORO EKO SAPUTRO	Jurusita PN Kepahiang Kelas II	Jurusita PN Tanjung Pinang

Tabel 17. Promosi

### 3. PENSUN

Pada Tahun 2019 tidak ada Hakim ataupun Pegawai di Pengadilan Negeri Kepahiang yang masuk dalam masa pensiun ataupun pensiun dini.

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		NIHIL	

Tabel 18. Pensiun

### 4. DIKLAT (SDM TEKNIS/NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT)

Pada tahun Anggaran 2019 jumlah pegawai Pengadilan Negeri Negeri Kepahiang yang mengikuti Diklat berjumlah 1 orang, yakni :

NO	NAMA	JABATAN	JENIS DIKLAT	PENYELENGGARA	TEMPAT
1	2	3	4		
			NIHIL		

Tabel 19. Diklat Teknis

NO	NAMA	JABATAN	JENIS DIKLAT	PENYELENGGARA	TEMPAT
1	2	3	4		
1.	TIA NURTHANA, S.Psi	CPNS	Seminar Rancangan Aktualisasi Peserta Pelatihan Dasar CPNS	Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI	UPT Diklat BKPSDM Lubuklinggau

			Gol III		
--	--	--	---------	--	--

**Tabel 20. Diklat Non Teknis**

## BAB IV. PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

### A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengadilan Negeri Kepahiang memiliki 2 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yakni DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) dengan Nomor DIPA : SP DIPA- 005.01.2.673041/2019 tanggal 5 Desember 2018 dengan Pagu sebesar Rp. 2.998.630.000 ( Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah ) dengan Revisi terakhir Rp. 3.213.941.000 ( Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah ) dan DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) dengan Nomor DIPA : DIPA-005.3.2.673042/2019 tanggal 5 Desember 2018 dengan PAGU sebesar Rp. 91.360.000 ( Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah ).

Berikut tabel perbandingan DIPA 01 Awal 2019 dan DIPA 01 setelah Revisi 2019

KODE	URAIAN	DIPA AWAL	DIPA REVISI
1066	<i>Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi</i>	2.985.630.000	3.104.941.000
1066.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	30.540.000	30.540.000
1066.994	Layanan Perkantoran	2.955.090.000	3.074.401.00
1066.994.001	Gaji dan Tunjangan	2.200.649.000	2.239.356.000
	<b>Tambahan Belanja Gaji Pokok PNS</b>	-	<b>153.581.000</b>
1066.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	754.441.000	835.045.000
	<b>Tambahan Langganan Internet (BA.BUN)</b>	-	<b>48.104.000</b>
1071	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung</i>	13.000.00	109.000.000
1071.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	13.000.00	109.000.000
1071.951.054	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	-	83.000.00
	<b>Rehab Jaringan Listrik</b>	-	<b>83.000.00</b>

Tabel 21. Diklat Non Teknis

Revisi yang mengubah Output Kegiatan ini karena adanya Tambahan Belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp. 153.581.000,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) pada output Layanan Perkantoran sub output Gaji dan Tunjangan, tambahan Tambahan Langganan Internet (BA.BUN) Rp. 48.104.000 (Empat Puluh Delapan Juta Seratus Empat Ribu Rupiah) pada Output Layanan Perkantoran sub output Operasional dan Pemeliharaan Kantor dan tambahan Belanja Modal berupa Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan yakni Rehab Jaringan Listrik sebesar Rp. 83.000.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah) pada output Layanan

Sarana dan Prasarana Internal sub output Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan.

Sedangkan pada DIPA 03 tidak terdapat revisi yang mengubah nilai output kegiatan, berikut tabel DIPA 03 Awal 2019 dan DIPA 03 setelah Revisi.

KODE	URAIAN	DIPA AWAL	DIPA REVISI
1049	<i>Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</i>	91.360.000	91.360.000
1049.003	Layanan Pos Bantuan Hukum	24.000.000	24.000.000
1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	65.520.000	65.520.000
1049.006	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	1.840.000	1.840.000

Tabel 22. Diklat Non Teknis

### 1. DIPA 01 (673041) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Terdiri dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Mahkamah Agung dengan nilai pagu sebesar Rp. **3.104.941.000,-** dengan nilai realisasi sebesar Rp. **3.071.543.503,-** atau **98,91%** dan Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan nilai pagu sebesar **109.000.000** dengan nilai realisasi sebesar **108.940.000** atau **99,94%**.

#### a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Mahkamah Agung Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi terdiri dari output Layanan Dukungan Manajemen Satker dengan nilai pagu sebesar **Rp.30.540.000** dan realisasi sebesar Rp. **30.521.000** atau **99,94%**, dan Output Layanan Perkantoran dengan nilai pagu sebesar **Rp. 3.074.401.000** dengan realisasi sebesar **Rp. 3.041.022.503,-** atau **98,4%** yang terdiri dari Gaji dan Tunjangan dengan nilai pagu sebesar **Rp. 2.239.356.000,-** dan realisasi sebesar **Rp. 2.228.812.392,-** atau **99,53%**, serta Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran dengan nilai pagu sebesar **Rp. 835.045.000,-** dan realisasi sebesar **Rp. 812.210.111,-** atau **97,27%**.

NO	KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN DIPA		
			PAGU (RP)	REALISASI (RP)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah	30.540.000	30.521.000	99,94

NO	KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN DIPA		
			PAGU (RP)	REALISASI (RP)	%
1	2	3	4	5	6
	Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Perkantoran	3.074.401.000	3.041.022.503	98.91
		- Gaji dan Tunjangan	2.239.356.000	2.228.812.392	99.53
		- Operasional dan Pemeliharaan Kantor	835.045.000	812.210.111	97.27
<b>Jumlah</b>			<b>3.074.401.000</b>	<b>3.041.022.503</b>	<b>98.91</b>

Tabel 23. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya

**b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung pada kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dengan output Layanan Internal dengan nilai pagu sebesar **Rp. 109.000.000,-** dan realisasi sebesar **Rp. 108.940.000,-** atau **99,94%**.

NO	KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN DIPA		
			PAGU (RP)	REALISASI (RP)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Internal	109.000.000		
		- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.000.000	108.940.000	99.94
<b>Jumlah</b>			<b>109.000.000</b>	<b>108.940.000</b>	<b>99.94</b>

Tabel 24. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

**c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP Umum)**

Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Umum pada Pengadilan Negeri Kepahiang berupa Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan dengan Estimasi Pendapatan sebesar **Rp. 1.680.000,-** dan Realisasi sebesar **Rp. 1.680.000,-** atau **100%**. Berikut tabel Jenis Pendapatan/Mata Anggaran Penerimaan (PNBP) :

**Jenis Pendapatan/Mata Anggaran Penerimaan (PNBP)**

NO.	URAIAN JENIS PENDAPATAN/ MATA ANGGARAN PENERIMAAN		ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN	%
I	PENDAPATAN DARI PEMANFAATAN BMN				
	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1.680.000	1.680.000	100
	JUMLAH TOTAL		1.680.000	1.680.000	100

Tabel 25. PNBPN Umum

## 2. DIPA 03 (673042) BADAN PERADILAN UMUM

Terdiri dari Program Peningkatan Manajemen Peradilan dengan nilai pagu sebesar **Rp. 91.360.000,-** dengan nilai realisasi sebesar **Rp. 90.451.000,-** atau **99,01%**.

### a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Program Peningkatan Manajemen Peradilan ini terdiri dari output yakni Pos Bantuan Hukum dengan nilai pagu sebesar **Rp. 24.000.000,-** dan realisasi sebesar **Rp. 24.000.000,-** atau **100%**, Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu dengan nilai pagu sebesar **Rp. 65.520.000,-** dan realisasi sebesar **Rp. 65.047.000,-** atau **92,27%** dan Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara dengan nilai pagu sebesar **Rp. 1.840.000,-** dan realisasi sebesar **Rp. 3.508.000,-** atau **76,30%**.

NO	KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN DIPA		
			PAGU (RP)	REALISASI (RP)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pos Bantuan Hukum	24.000.000	24.000.000	100
		Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	65.520.000	65.047.000	99.27
		Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	1.840.000	1.404.000	76.30
Jumlah			91.360.000	90.451.000	99.01

Tabel 26. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

### a. Penerimaan PNBP yang berasal dari Hak – Hak Kepaniteraan

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetorkan ke kas negara untuk PNBP Fungsional sampai dengan per 31 Desember 2019 adalah **Rp. 3.328.300,-** yang berasal dari Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan sebesar **Rp. 40.000,-** atau **26,66%** dari estimasi pendapatan sebesar **Rp. 150.000,-** Pendapatan Ongkos Perkara **Rp. 1.490.000,-** atau **99,33%** dari estimasi pendapatan sebesar **Rp. 1.500.000,-** dan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya sebesar **Rp. 1.798.300,-** atau **89,91%** dari estimasi pendapatan sebesar **Rp. 2.000.000,-**.

NO.	URAIAN JENIS PENDAPATAN/ MATA ANGGARAN PENERIMAAN		ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN	%
I	PENDAPATAN KEJAKSAAN DAN PERADILAN SERTA GRATIFIKASI				
	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	150.000	40.000	26,66
	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	1.500.000	1.490.000	99,33
	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	2.000.000	1.798.300	89,91
	<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>3.650.000</b>	<b>3.328.300</b>	<b>91,18</b>

Tabel 27. PNBP Fungsional

### B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengadilan Negeri Kepahiang memiliki sarana gedung kantor yang beralamat di Jalan Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang, gedung tersebut dibangun diatas lahan seluas 9.650 M2 dengan luas bangunan 1400 M2. Gedung tersebut dibangun 2 (dua) lantai dengan membebaskan anggaran dari dana APBN Tahun 2010 dan 2011 melalui DIPA satuan kerja Pengadilan Negeri Kepahiang, pekerjaan pembangunan gedung tersebut telah sesuai dengan Prototipe yang ditentukan oleh Mahkamah Agung yaitu memiliki 4 (empat) pilar didepan, 3 (tiga) ruang sidang dan ruangan-ruangan untuk Kepaniteraan dan Kesekretariatan.



Gambar 3. Gedung

Fasilitas gedung yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Kepahiang sebagai berikut :

- a. Ruang Pelayanan, terdiri dari :
  - 2 ruang sidang dewasa, 1 ruang sidang anak, 1 ruang teleconference korban/saksi anak, 1 ruang tunggu ramah anak, 1 ruang mediasi/diversi/kaukus, 1 ruang tahanan Pria, 1 ruang tahanan wanita, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang Laktasi/Difable dan 1 ruang pos bantuan hukum, 1 ruang tunggu Jaksa.
- b. Ruang kerja, terdiri dari :
  - Ruang Kerja Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Hukum, Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bag Kepegawaian dan Ortala, Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
- c. Ruang Pendukung
  - Ruang arsip hukum, ruang arsip kesekretariatan, ruang perpustakaan, Ruang Server, Ruang Barang Bukti, Ruang Genset, Ruang Pos jaga, Musholla.

Sarana dan Prasarana gedung yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Kepahiang sebagai berikut :

NO	SARANA / PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
I	<b>Gedung</b>		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	2	



NO	SARANA / PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Panitera Muda Pidana	1	
6	Ruang Panitera Muda Perdata	1	
7	Ruang Panitera Muda Hukum	1	
8	Ruang Sekretaris	1	
9	Ruang Umum dan Keuangan	1	
10	Ruang Kepegawaian dan Ortala	1	
11	Ruang Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	
12	Ruang Sidang	3	
13	Ruang Mediasi dan Diversi	1	
14	Ruang Kaukus	1	
15	Ruang Penjara	2	
16	Ruang Posbakum	1	
17	Ruang Tunggu Anak	1	
18	Ruang Perpustakaan	1	
19	Ruang Server	1	
20	Ruang Arsip	2	
21	Ruang Toilet	10	
22	Ruang Barang Bukti	1	
23	Ruang Genset	1	
24	Ruang Disabilitas	1	
25	Ruang Tunggu Jaksa	1	
26	Ruang Tunggu Mediasi	1	
27	Ruang Tunggu Terbuka	1	
<b>II</b>	<b>Fasilitas Perkantoran</b>		
1	Komputer	26	
2	Printer	23	
3	Scanner	5	
4	Laptop	9	
5	Mini Computer	1	
6	PABX	1	
7	Air Conditioner	15	
8	Brankas	2	
9	Faximile	1	
10	Finger Print	1	
11	Server	2	
12	Router	1	
13	Hub	1	
14	Camera Digital	1	
15	TV	2	
16	CCTV	16	
17	Genset	1	

NO	SARANA / PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
18	Lambang Instansi	1	
19	Lemari Kayu	32	
20	Rak Kayu	8	
21	Publik Astari	2	
22	Meja Kerja Kayu	33	
23	Meja Rapat	1	
24	Meja Resepsionis	2	
25	Sice	6	
26	Kursi Besi/Metal	72	
27	Kursi Zeis	10	
28	Kursi Kayu	23	

Tabel 28. Gedung dan Fasilitas Perkantoran

- d. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dikelola melalui Aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara).
- e. Berikut Asset Tanah dan Bangunan yang dimiliki oleh Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang.

NO	TANAH	LUAS (m2)	BUKTI KEPEMILIKAN	LOKASI
1	2	3	4	4
1	Tanah Gedung Kantor	9.650	000028/06-01-2011	Jl. Aipda Muán Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang Kel. Pelangkian Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang
2	Tanah Eks. PN Kepahiang	1.000	07.07.01.02.4.00004/01- 11-2011	Jl. Pembangunan Kelurahan Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang

Tabel 29. Aset Tanah

NO	BANGUNAN	LUAS (m2)	DI BANGUN TAHUN	LOKASI
1	2	3	4	4
1	Gedung Kantor PN Kepahiang	9.650	2011	Jl. Aipda Muán Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang Kel. Pelangkian Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang
2	Gedung Eks. Kantor PN	620	1982	Jl. Pembangunan

NO	BANGUNAN	LUAS (m2)	DI BANGUN TAHUN	LOKASI
1	2	3		4
	Kepahiang			Kelurahan Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang
3	Ruang Barang Bukti	296	2015	Jl. Aipda Muán Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang Kel. Pelangkian Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang
4	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya (Ruang Genset)	12	2017	Jl. Aipda Muán Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang Kel. Pelangkian Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang
5	Gedung Pos Jaga Permanen	36	2015	Jl. Aipda Muán Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang Kel. Pelangkian Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang
6	Musholla	12	2019	Jl. Aipda Muán Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang Kel. Pelangkian Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang

Tabel 30. Aset Bangunan

## 1. KENDARAAN DINAS

Pengadilan Negeri Kepahiang pada saat ini telah memiliki 4 (empat) Kendaraan Dinas Roda Empat, kendaraan dinas roda empat tersebut diperoleh dari Mahkamah Agung 1 (satu) Unit dan pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang sebanyak 3 (tiga) Unit serta Kendaraan Dinas Roda Dua sebanyak 4 unit Milik Sendiri, yakni sebagai berikut :

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	2	3	4	5	6	7

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Jenis Kendaraan Roda 4</b>					
1.	Toyota Innova	2009	Baik	-	-	Penyerahan dari MA
2.	Toyota Fortuner	2015	Baik	-	-	Pinjam Pakai Pemda Kepahiang
3.	Toyota Avanza	2018	Baik	-	-	Pinjam Pakai Pemda Kepahiang
4.	Suzuki APV	2019	Baik	-	-	Pinjam Pakai Pemda Kepahiang
<b>II</b>	<b>Jenis Kendaraan Roda 2</b>					
1.	Yamaha Jupiter	2015	Baik	-	-	Milik Sendiri
2.	Yamaha Jupiter	2015	Baik	-	-	Milik Sendiri
3.	Yamaha Jupiter	2013	Baik	-	-	Milik Sendiri
4.	Yamaha Jupiter	2013	Baik	-	-	Milik Sendiri

Tabel 31. Kendaraan Dinas

## 2. TATA PERSURATAN DAN KEARSIPAN

- a. Pengelolaan surat masuk dan surat keluar di pusatkan pada Subbagian Umum dan Keuangan dengan alat bantu pencatatan berupa aplikasi surat dan buku register surat masuk dan surat keluar dan buku ekspedisi.
- b. Pengarsipan surat masuk ditempatkan di masing-masing bagian sesuai disposisi Ketua atau Panitera maupun Sekretaris, sedangkan Arsip Surat Keluar dipusatkan disimpan di bagian Umum dan keuangan dan disetiap bagian yang mengeluarkan surat.
- c. Jumlah Surat Masuk sampai Per 31 Desember 2018 adalah sebanyak 762 surat sedangkan untuk surat keluar sebanyak 1291 surat.
- d. Buku-buku Register surat masuk dan surat keluar beserta buku-buku ekspedisinya diarsipkan di Subbagian Umum dan Keuangan.

## 3. PERPUSTAKAAN

- a. Telah dilakukan pengelolaan buku-buku perpustakaan dengan menggunakan buku bantu dan aplikasi perpustakaan.
- b. Buku-buku Perpustakaan diberikan Label dan stempel, penataan buku perpustakaan serta penataan ruang perpustakaan.
- c. Jumlah Buku perpustakaan per 31 Desember 2019 sebanyak 555 buku dan sudah dimasukkan kedalam aplikasi Perpustakaan sebanyak 555 buku.

### C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Untuk mendukung Administrasi pengadilan yang tertib, modern dan akuntabel, Mahkamah Agung RI telah menetapkan bahwa seluruh pengadilan harus beralih dari administrasi pengadilan yang dilakukan secara manual (konvensional) beralih ke administrasi pengadilan yang berbasis Teknologi Informasi (TI), hal ini dikarenakan adanya peningkatan administrasi, tuntutan transparansi dan akuntabilitas dan kebutuhan akses terhadap data yang akurat, lengkap dan mutakhir. Penerapan Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Kepahiang antara lain dengan penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)/Case Track System (CTS) dan publikasi perkara melalui website Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)/Case Track System (CTS) pada alamat <http://sipp.pn-kepahiang.go.id> dan meningkatkan pengunggahan putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penggunaan Aplikasi Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pemberian akses perkara dan informasi umum lainnya melalui website pada alamat [www.pn-kepahiang.go.id](http://www.pn-kepahiang.go.id), meja informasi dan informasi display jadwal sidang, aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) untuk memonitor pelaksanaan SIPP dan portal aplikasi untuk memudahkan pengguna internal Pengadilan Negeri Kepahiang dalam mengakses aplikasi.

#### 1. IMPLEMENTASI E-COURT DI PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG

Pengadilan Negeri Kepahiang telah menerapkan e-Court Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.



Gambar 4. e-Court Mahkamah Agung

Pada tahun 2019, jumlah perkara yang perdata yang masuk melalui e-Court sebanyak 2 perkara dari Perkara Perdata Permohonan, sementara dari Perdata Gugatan, Bantahan, Gugatan Sederhana belum ada perkara yang masuk melalui e-Court.

Informasi e-Court pada website PN Kepahiang



Gambar 5. e-Court Informasi e-Court

**2. IMPLEMENTASI SIPP DI PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG**

Pada Tahun 2019, jumlah perkara yang di input pada aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Negeri Kepahiang sebanyak 2.266 perkara, terdiri dari perkara perdata 57 perkara, perkara pidana 154 perkara dan perkara lalu – lintas sebanyak 2.055 perkara dimana terdapat sisa perkara tahun 2018 sebanyak 28 perkara terdiri dari perkara perdata 1 perkara dan perkara pidana 27 perkara, sedangkan keseluruhan perkara yang telah putus sebanyak 2.263 perkara terdiri dari perkara perdata 57 perkara dan perkara pidana 151 perkara dan perkara lalu lintas sebanyak 2.055.

## Keadaan Perkara Perdata dan Pidana

NO	KLASIFIKASI PERKARA	SISA PERKARA 2018	JUMLAH PERKARA TAHUN 2019		SISA PERKARA 2019	KETERANGAN
			MASUK	PUTUS		
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Pengadilan Negeri Kepahiang</b>					
<b>A</b>	<b>Perdata</b>					
1	Perdata Gugatan	-	5	4	1	-
2	Perdata Permohonan	1	50	51	-	-
3	Gugatan Sederhana	-	2	2	-	-
	<b>Jumlah A</b>	<b>1</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>B</b>	<b>Pidana</b>					
1	Pidana Biasa	26	144	140	30	-
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	1	1	-	-
4	Pidana Anak	1	9	10	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>27</b>	<b>154</b>	<b>151</b>	<b>30</b>	
4	Pidana Lalu-Lintas	-	2055	2055	-	-
	<b>Jumlah B</b>	<b>-</b>	<b>2209</b>	<b>2206</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH A + B</b>	<b>28</b>	<b>2266</b>	<b>2263</b>	<b>31</b>	<b>-</b>

Tabel 32. Keadaan Perkara Perdata dan Perkara Pidana

Jumlah perkara yang di publish di website Pengadilan Negeri Kepahiang melalui website system informasi penelusuran perkara pada alamat [sipp.pn-kepahiang.go.id](http://sipp.pn-kepahiang.go.id) untuk tahun 2019, sebanyak 2.266 perkara, terdiri dari perkara perdata 57 perkara, perkara pidana 154 perkara dan perkara lalu – lintas sebanyak 2.055 perkara dimana terdapat sisa perkara tahun 2018 sebanyak 28 perkara terdiri dari perkara perdata 1 perkara dan perkara pidana 27 perkara, sedangkan keseluruhan perkara yang telah putus sebanyak 2.263 perkara terdiri dari perkara perdata 57 perkara dan perkara pidana 151 perkara dan perkara lalu lintas sebanyak 2.055.

JUMLAH PERKARA DI WEBSITE						
NO	KLASIFIKASI PERKARA	SISA PERKARA 2017	JUMLAH PERKARA TAHUN 2018		SISA PERKARA 2018	KETERANGAN
			MASUK	PUTUS		
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Pengadilan Negeri Kepahiang</b>					

A Perdata						
1	Perdata Gugatan	4	6	10	-	-
	Perdata Permohonan	-	42	42	-	-
3	Gugatan Sederhana	-	3	-	3	-
	<b>Jumlah A</b>	<b>4</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
B Pidana						
1	Pidana Biasa	19	134	127	26	-
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	-	-	-	-
4	Pidana Anak	1	23	24	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>20</b>	<b>157</b>	<b>151</b>	<b>26</b>	
4	Pidana Lalu-Lintas	-	3.100	3.100	-	-
	<b>Jumlah B</b>	<b>20</b>	<b>3.257</b>	<b>3.251</b>	<b>26</b>	
	<b>JUMLAH A + B</b>	<b>20</b>	<b>3.308</b>	<b>3.303</b>	<b>29</b>	<b>-</b>

Tabel 33. Rekapitulasi Perkara di Website

## Website SIPP PN Kepahiang

**Sistem Informasi Penelusuran Perkara**  
PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG

Beranda Perdata Umum Perdata Khusus Pidana Pidana Khusus Jadwal Sidang Laporan Delegasi

**STATISTIK PERKARA**  
Bulan : Desember 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Desember 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	1	0	0	0	0	1
2	Permohonan	2	1	2	2	0	1
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
9	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015 Versi 3.3.0-1

Gambar 6. Website SIPP



## BAB V. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

### A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Akreditasi Penjaminan Mutu adalah untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul /Prima (Indonesia Court Performance Excellent - ICPE).

Pengadilan Negeri Kepahiang yang merupakan pengadilan tingkat pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu berupaya memberikan pelayanan publik yang prima. Untuk mewujudkannya, pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Kepahiang ikut dalam penilaian atau Akreditasi Penjaminan Mutu.

Berdasarkan hasil Penilaian Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI untuk Pengadilan Negeri tahun 2017, Pengadilan Negeri Kepahiang memperoleh Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Nomor : TAPM. 195/QMR/SERTIFIKAT/11/2017 dengan nilai A Excellent.

Penghargaan Akreditasi ini diberikan langsung oleh Prof Dr. H. Muhammad Hatta Ali SH.,MH selaku Ketua Mahkamah Agung R.I bersama Herry Swantoro SH., MH selaku Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum bertempat di Hotel Clarion Makassar, Sulawesi Selatan pada hari rabu, tanggal 29 November 2017 (29/11).



Gambar 7. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum

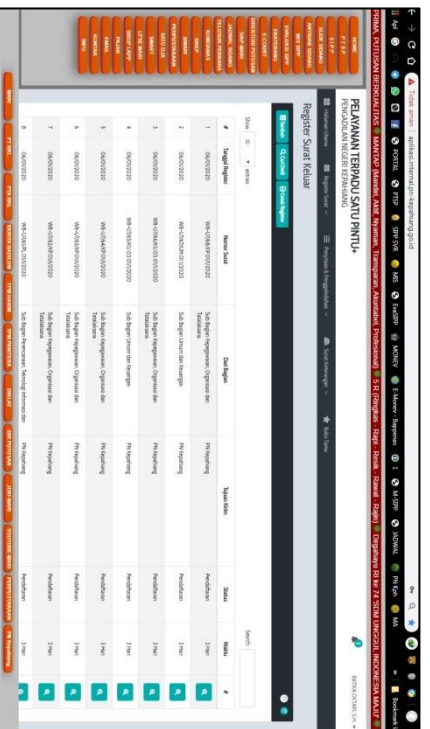
## B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP+) Dan Surat Keterangan Elektronik (Eraterang) Di Lingkungan Peradilan Umum dan surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : W8-U7/307/KP.04.6/3/2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Kepahiang, Pengadilan Negeri Kepahiang telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



Gambar 8. Meja PTSP

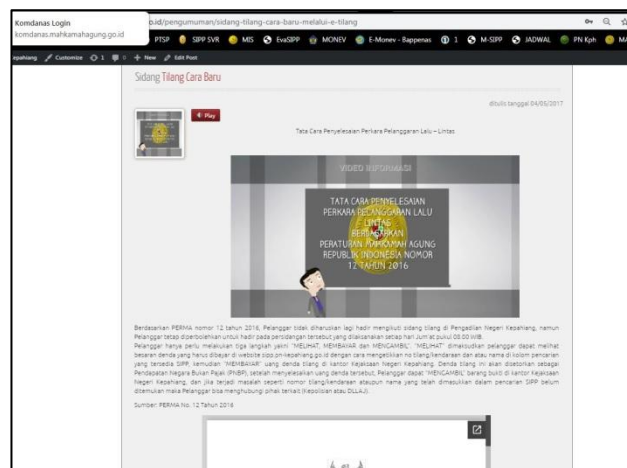
Untuk menunjang penyelenggaraan PTSP Pengadilan Negeri Kepahiang telah menyediakan sarana dan prasarana berupa Meja PTSP yang terdiri dari Pelayanan Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Hukum, Sub Bagian Umum dan Keuangan untuk Penyelenggaraan Pelayanan Surat Masuk dan Surat Keluar pada aplikasi PTSP dan Meja Informasi. Meja PTSP ini telah dilengkapi Perangkat Pengolah Data dan Akses ke Aplikasi PTSP dan SIPP serta Akses Internet dan Printer serta Scanner.



Gambar 9. Aplikasi PTSP

**C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK**

Untuk mendukung PERMA nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Pengadilan Negeri Kepahiang menyampaikan informasi PERMA nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas kepada masyarakat dan sebagai salah satu bentuk pelayanan publik melalui website, link yang mengarah langsung ke akses perkara lalu lintas pada website sipp dan video informasi tentang PERMA nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas serta informasi melalui papan informasi.



**Gambar 10. Informasi Perkara Lalu lintas**

## BAB VI. PENGAWASAN

### A. INTERNAL

Dalam hal Pengawasan, Pengadilan Negeri Kepahiang berpedoman pada Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan.

Di Pengadilan Negeri Kepahiang Pelaksanaan Pengawasan internal telah dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang melalui Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri Kepahiang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang No.W8-U7/47/KP.04.6/1/2019 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri Kepahiang. Adapun daftar Hakim Pengawas Bidang pada satuan Kerja Pengadilan Negeri Kepahiang adalah sebagai berikut :

#### Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Kepahiang

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	2	3	
1.	IRWIN ZAILY, SH., MH	Wakil Ketua	- Koordinator Hakim Pengawas
2	YULIA MARHAENA, S.H.	Hakim	- Pengawas Bidang Kesekretariatan
3.	YONGKI, SH	Hakim	- Pengawas Bidang Kepaniteraan dan WASMAT

Tabel 34. Hakim Pengawas Bidang

Sehubungan dengan Promosi dan Mutasinya YULIA MARHAENA, S.H sebagai Hakim Pengawas Bidang Kesekretariatan, Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang menunjuk kembali Koordinator Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri Kepahiang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang No.W8-U7/698a/KP.04.6/6/2019 tentang Koordinator Hakim Pengawas Dan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri Kepahiang. Adapun daftar Hakim Pengawas Bidang pada satuan Kerja Pengadilan Negeri Kepahiang adalah sebagai berikut :

#### Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Kepahiang

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	2	3	
1.	IRWIN ZAILY, SH., MH	Wakil Ketua	- Koordinator Hakim Pengawas

3.	YONGKI, SH	Hakim	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawas Bidang Kepaniteraan</li> <li>- Pengawas Bidang Kesekretariatan</li> <li>- Hakim Wasmal</li> <li>- Humas</li> </ul>
----	------------	-------	--

Tabel 35. Hakim Pengawas Bidang

Hakim Pengawas Bidang ini membuat laporan Pengawasan setiap bulan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang pada pertemuan rutin bulanan.

Untuk Pengawasan Keuangan sesuai dengan Pedoman pengawasan telah dilakukan pemeriksaan atas pengelolaan DIPA dan pemeriksaan atas laporan realisasi anggaran belanja.

Secara Rutin telah dilaksanakan rapat bulanan yang membahas antara lain:

- Evaluasi kinerja dan penyampaian hasil temuan dari masing-masing hakim pengawas bidang disertai rekomendasi dan tindak lanjut.
- Mengumumkan bila ada peraturan, kebijakan baru serta informasi penting baik yang berasal dari Pimpinan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi ataupun yang berasal dari instansi lain yang perlu disampaikan kepada seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Kepahiang.
- Laporan minutasinya perkara termasuk pengecekan pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Direktori putusan
- Secara berkala dilakukan rapat berjenjang mulai dari rapat masing-masing Kepaniteraan dan sub bagian, rapat pejabat struktural/fungsional kepaniteraan dan kesekretariatan, Rapat 4 Pilar untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing bagian dalam pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsinya serta mencari solusi pemecahannya.
- Secara berkala melakukan pemeriksaan/peninjauan langsung tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai SOP.
- Pengawasan kedisiplinan oleh pimpinan /Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang selaku Koordinator Pengawasan atau petugas yang ditunjuk.
- Secara rutin dan berkala dilakukan pemeriksaan uang kas bendahara pengeluaran, serta pembukuan dan penatalaksanaan arsip.

## B. EVALUASI

Berikut beberapa permasalahan/hambatan yang ditemukan dari hasil evaluasi dan pengawasan internal, diantaranya :

1. Masih ada pegawai yang mempunyai tugas tambahan/rangkap pekerjaan disamping tugas pokok yang diembannya, hal ini disebabkan kurangnya jumlah

pegawai.

2. Sarana dan prasarana alat pengolah data seperti Laptop, Komputer dan Printer, Scanner untuk Hakim, Panitera Pengganti dan Staff masih belum memenuhi kebutuhan kerja.

Evaluasi terhadap pengawasan dilakukan Pengadilan Negeri Kepahiang setiap satu bulan sekali dengan diadakannya rapat bulanan yang mana setiap bidang baik dari kesekretariatan maupun kepaniteraan membuat laporan masing masing dan melakukan evaluasi kinerja guna peningkatan dan pembaharuan dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik.

## BAB VII. PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Kepahiang tahun 2019 ini, memuat uraian lengkap mengenai berbagai pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Pengadilan Negeri Kepahiang, baik itu berupa program kerja, kebijakan strategi bidang peradilan dalam menjawab tantangan dan peluang alokasi anggaran dan realisasi Tahun 2019, realisasi program Tahun 2019, serta rencana kerja Tahun 2019. Kami menyadari bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kepahiang masih perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang maksimal sesuai yang diharapkan, kami juga menyadari bahwa pembangunan sektor atau bidang hukum tidak mungkin dilaksanakan Pengadilan Negeri Kepahiang dalam waktu singkat, untuk itu kami mengajak partisipasi aktif dari seluruh masyarakat maupun pencari keadilan dan siapa saja yang mempunyai kepedulian terhadap kemajuan Pengadilan Negeri Kepahiang secara bersama-sama membangun secara terencana dan konperhensif.

Secara umum pelaksanaan kinerja Pengadilan Kepahiang sudah berjalan dengan baik, dan juga dalam Pelaksanaan administrasi yustisial sudah berjalan dengan baik meskipun demikian guna mengeliminir terjadinya kesalahan harus dilakukan pengawasan secara berkala. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan baik yang menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah dilaksanakan dengan baik. Penatausahaan bagian Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Hukum, Kesekretariatan subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Subbagian Perencanaan, Organisasi, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Subbagian Umum dan Keuangan dan telah dilaksanakan baik.

### B. REKOMENDASI

1. Diharapkan adanya pengalokasian Anggaran Belanja Modal untuk pembangunan fasilitas Rumah Dinas bagi Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris, karena sejak Pengadilan Negeri kepahiang ini diresmikan pada tahun 2009, Mahkamah Agung belum pernah memberi Alokasi Anggaran untuk pembangunan Rumah Dinas.
2. Perlu adanya Penambahan sumber Daya manusia (SDM) Pegawai, Hakim dan Honorer/Tenaga Kontrak mengingat Pengadilan Negeri kepahiang masih kekurangan pegawai terutama Sumber Daya Manusia untuk Jabatan Hakim.
3. Diharapkan adanya penambahan fasilitas sarana dan prasarana lain sebagai penunjang kinerja.

## LAMPIRAN

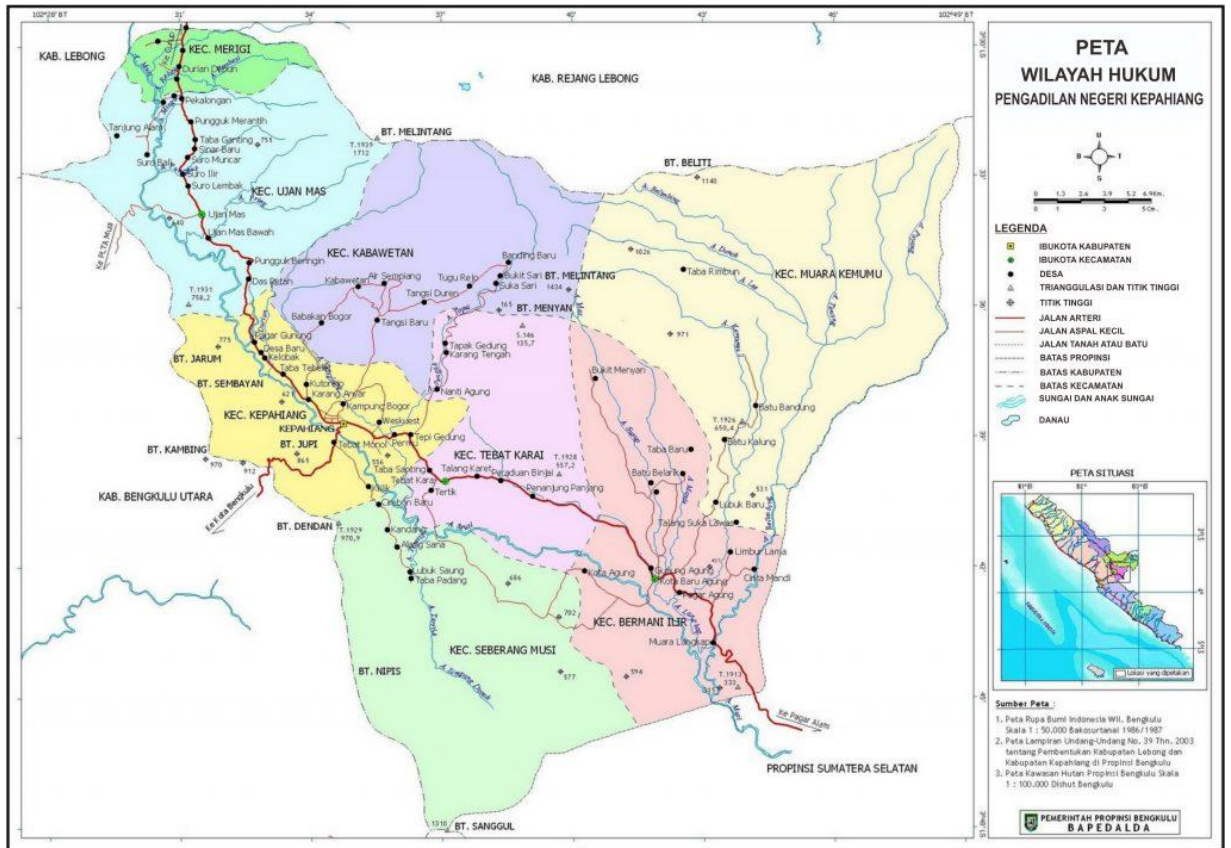
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
TAHUN 2019  
PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG  
KELAS II



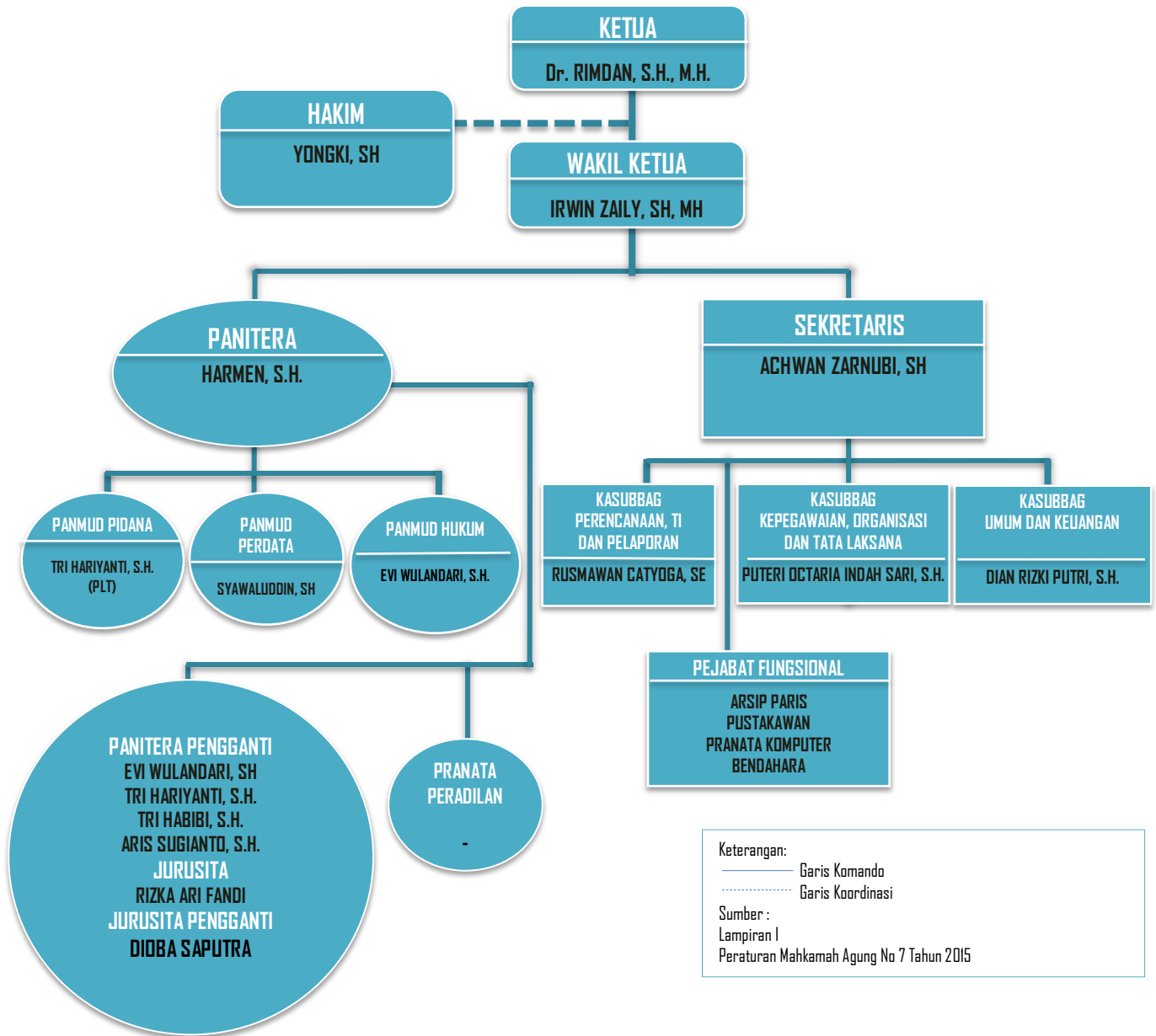
## MATRIK LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019

### I. PENDAHULUAN

#### A. PETA WILAYAH HUKUM



**B. STRUKTUR ORGANISASI**



Keterangan:  
 ————— Garis Komando  
 - - - - - Garis Koordinasi  
 Sumber :  
 Lampiran I  
 Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015

## II.

## A. KEADAAN PERKARA

Keadaan Perkara Perdata dan Pidana

NO	KLASIFIKASI PERKARA	SISA PERKARA 2017	JUMLAH PERKARA TAHUN 2018		SISA PERKARA 2018	KETERANGAN
			MASUK	PUTUS		
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Pengadilan Negeri Kepahiang</b>					
<b>A</b>	<b>Perdata</b>					
1	Perdata Gugatan	-	5	4	1	-
2	Perdata Permohonan	1	50	51	-	-
3	Gugatan Sederhana	-	2	2	-	-
	<b>Jumlah A</b>	<b>1</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>B</b>	<b>Pidana</b>					
1	Pidana Biasa	26	144	140	30	-
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	1	1	-	-
4	Pidana Anak	1	9	10	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>27</b>	<b>154</b>	<b>151</b>	<b>30</b>	
4	Pidana Lalu-Lintas	-	2055	2055	-	-
	<b>Jumlah B</b>	<b>-</b>	<b>2055</b>	<b>2055</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH A + B</b>	<b>20</b>	<b>3.308</b>	<b>3.303</b>	<b>29</b>	<b>-</b>

## B. PENYELESAIAN PERKARA

## 1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

## a. Perkara Perdata

NO	KLASIFIKASI PERKARA	SISA PERKARA 2017	PUTUS 2018	KETERANGAN
1	2	3	6	7
1	Perdata Gugatan	-	4	-
2	Perdata Permohonan	-	51	-
3	Gugatan Sederhana	-	2	-
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>57</b>	<b>-</b>

## b. Perkara Pidana

NO	KLASIFIKASI PERKARA	SISA PERKARA 2017	PUTUS 2018	KETERANGAN
1	2	3	4	7
1	Pidana Biasa	26	140	-
2	Pidana Singkat	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	1	
4	Pidana Lalu-Lintas	-	-	
5	Pidana Anak	1	9	
	<b>Jumlah</b>	<b>27</b>	<b>150</b>	<b>-</b>

## 2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

### a. Perkara Perdata

NO	NAMA	SISA PERKARA 2017	JUMLAH PERKARA TAHUN 2018		SISA PERKARA 2018	PUTUS TEPAT WAKTU
			MASUK	PUTUS		
1	2	3	4	5		6
1	Perdata Gugatan	-	5	4	-	4
2	Perdata Permohonan	1	50	51	-	51
3	Gugatan Sederhana	-	2	2	-	2
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>57</b>	<b>57</b>		<b>57</b>

### b. Perkara Pidana

NO	NAMA	SISA PERKARA 2017	JUMLAH PERKARA TAHUN 2018		SISA PERKARA 2018	PUTUS TEPAT WAKTU
			MASUK	PUTUS		
1	2	3	4	5		6
1	Pidana Biasa	26	144	140	30	140
2	Pidana Singkat	-	-	-		-
3	Pidana Cepat	-	1	1		1
4	Pidana Anak	1	9	10		10
	<b>Jumlah</b>	<b>27</b>	<b>154</b>	<b>141</b>	<b>30</b>	<b>151</b>

4	Pidana Lalu-Lintas	-	2055	2055	-	2055
<b>Jumlah</b>		-	2055	2055	-	2055

### 3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)

#### a. Perkara Perdata

NO	KLASIFIKASI PERKARA	PUTUS	BANDING	KASASI	PK	TIDAK UPAYA HUKUM
1	2		4	6		7
1	Perdata Gugatan	4	1	-	-	3
2	Perdata Permohonan	51	-	-	-	51
<b>Jumlah</b>		<b>55</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56</b>

#### b. Perkara Pidana

NO	KLASIFIKASI PERKARA	PUTUS	BANDING	KASASI	PENINJAUAN KEMBALI (PK)	TIDAK UPAYA HUKUM
1	2		4	6	7	
1	Pidana Biasa	140	8	2	-	150
2	Pidana Anak	10	-	-	-	10
3	Pidana Singkat		-	-	-	
<b>Jumlah</b>		<b>150</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>160</b>

### 4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI

NO	KLASIFIKASI PER JENIS PERKARA	JUMLAH PERKARA MEDIASI		BERHASIL	TIDAK BERHASIL	TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN
		SISA TAHUN LALU	TAHUN BERJALAN			
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 5. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI

NO	KLASIFIKASI	SISA	JUMLAH	SISA	HASIL DIVERSI
----	-------------	------	--------	------	---------------

	PERKARA	TAHUN LALU	PERKARA TAHUN 2019		2019			
			MASUK	PUTUS		BERHASIL	TIDAK BERHASIL	TIDAK DIVERSI
1			2		3		4	
1	Kesusilaan	-	-	-	-	-	-	-
2	Penganiyaan	-	2	2	-	-	-	2
3	Pencurian	-	6	6	-	-	-	6
4	Penggelapan	-	-	-	-	-	-	-
5	Tindak Pidana Senjata Api tau Benda Tajam	-	-	-	-	-	-	-
6	Narkotika	-	-	-	-	-	-	-
7	Perlindungan Anak	-	1	1	-	-	-	1
8	Kekerasan Dalam Rumah	-	-	-	-	-	-	-
9	Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang atau Barang	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	-	<b>9</b>	<b>9</b>	-	-	-	<b>9</b>

### C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

#### 1. POSBAKUM

NO	NAMA	LEMBAGA	JENIS LAYANAN	LAYANAN
1		2	3	4
1	M. Gunawan, S.H.	LKBH Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup	- Penyediaan Informasi - Konsultasi - Advice Hukum	244 Layanan
		<b>TOTAL LAYANAN</b>		<b>244 Layanan</b>

#### 2. SIDANG KELILING/PELAYAN TERPADU

NO	KLASIFIKASI PERKARA	JENIS PERKARA	JUMLAH
1	2	3	4
-	-	-	-
	<b>Total</b>	-	-

**3. PERKARA PRODEO**

<b>NO</b>	<b>KLASIFIKASI PERKARA</b>	<b>JENIS PERMOHONAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Perdata Permohonan	Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran	9
	<b>Total</b>		<b>9</b>

### III. SUMBER DAYA MANUSIA

#### A. KOMPOSISI SDM

##### 1. Pegawai

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT / GOLONGAN	PENDIDIKAN
1	2	3	5	
<b>I</b>	<b>Pengadilan Negeri Kepahiang</b>			
1.	Dr. RIMDAN, S.H., M.H.	Ketua	Pembina Tk. I / IV/b	S3
2.	IRWIN ZAILY, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Pembina / IV/a	S2
3.	YONGKI, S.H.	Hakim	Hakim Pratama Madya III/c	S1
4.	HARMEN, S.H.	Panitera	Penata Tk. I / III/d	S1
5.	ACHWAN ZARNUBI, S.H.	Sekretaris	Penata / III/c	S1
6.	SYAWALUDDIN, S.H.	Panmud Perdata	Penata / III/c	S1
7.	EVI WULANDARI, S.H.	Panmud Hukum	Penata Muda Tk. I / III/b	S1
8.	RUSMAWAN CATYOGA, S.H.	Kasub Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penata Muda Tk. I / III/b	S1
9.	PUTERI OCTARIA INDAH SARI, S.H.	Kasub Kepegawaian dan Ortala	Penata Muda Tk. I / III/b	S1
10.	DIAN RIZKI PUTRI, S.H.	Kasub Umum dan Keuangan	Penata Muda Tk. I / III/b	S1
11.	ARIS SUGIANTO, S.H.	Panitera Pengganti	Penata Muda Tk. I III/b	S1
12.	AKHMAD TRI HABIBI, S.H.	Panitera Pengganti	Penata Muda Tk. I III/b	S2
13.	TRI HARIYANTI, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Penata Muda Tk. I III/b	S2
14.	RIZKA ARI FANDI	Juru Sita	Pengatur II/c	SMA
15.	DIOBA SAPUTRA	Juru Sita Pengganti	Pengatur II/c	SMA
16.	YURIS PRAWIRATAMA, S.H.	Staf Pidana	Penata Muda Tk. I III/b	S1
17.	YEYEN KURNIADI, S.H.	Staf Pidana	Penata Muda Tk. I III/b	S1
18.	TEMY EKA PUTRA	Staf Subbag Umum dan Keuangan	Pengatur Muda Tk. I II/b	SMA



NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT / GOLONGAN	PENDIDIKAN
1	2	3	5	
19.	TIA NURTIHANA, S.Psi.	CPNS/Staf Perdata	Penata Muda/III/a	S1
20.	RIZKI FEBRIANTI, S.H.	PNS/CAKIM	Penata Muda/III/a	S1
21.	TIOMINAR MANURUNG, S.H.	PNS/CAKIM	Penata Muda/III/a	S1
22.	ANTON ALEXANDER, S.H.	PNS/CAKIM	Penata Muda/III/a	S1
23.	EMMA YOSEPHINE SINAGA, S.H.	PNS/CAKIM	Penata Muda/III/a	S1

## 2. Tenaga Kontrak

NO	NAMA	TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Pengadilan Negeri Kepahiang</b>		
1.	AKMAL YUSUF, S.KOM.I.	Pramubakti	Tenaga Kontrak
2.	YASIR ARAFAT	Pramubakti	Tenaga Kontrak
3.	VINA OKTAVIANI	Pramubakti	Tenaga Kontrak
4.	ARIS MUNANDAR	Satpam	Tenaga Kontrak
5.	MUHAMMAD IKHSAN GUSTIAN	Satpam	Tenaga Kontrak
6.	DWIPAYANA DARISMAN PUTRA, S.Sos.	Supir	Tenaga Kontrak

## B. MUTASI

### a) Mutasi Keluar

NO	NAMA	SEBELUMNYA	MUTASI KE
1	2	5	
1.	AK BAGUS INDARYANTO, S.H.	Panitera Muda Pidana PN Kepahiang Kelas II	Mutasi ke PN Curup
2.	HATTA THALIB, S.H., M.H.	Panitera PN Kepahiang Kelas II	Mutasi ke PN Blambangan Umpu
3.	ENDANG WINARTI, A.Md	Fungsional Umum dan Keuangan PN Kepahiang Kelas II	Mutasi ke PN Simalungun
4.	YULIA MARHAENA, S.H.	Hakim PN Kepahiang Kelas II	Mutasi ke PN Lubuk Linggau
5.	YOSSO WIDIYANTORO EKO SAPUTRO	Jurusita PN Kepahiang Kelas II	Mutasi ke PN Tanjung Pinang

## b) Mutasi Masuk

NO	NAMA	MUTASI DARI	TMT
1	2	5	6
1.	HARMEN, S.H.	Panitera PN Lubuk Linggau	Panitera PN Kepahiang Kelas II
2.	TIA NURTIHANA, S.Psi.	CPNS	Pelaksana Kewanitaraan Perdata PN Kepahiang Kelas II

## C. PROMOSI

NO	NAMA	JABATAN SEBELUMNYA	JABATAN BARU
1	2	3	4
1.	AK BAGUS INDARYANTO, S.H.	Panitera Muda Pidana PN Kepahiang Kelas II	Panitera Muda Pidana PN Curup Kelas I B
2.	ENDANG WINARTI, A.Md.	Staf Umum dan Keuangan PN Kepahiang Kelas II	Staf Umum dan Keuangan PN Kepahiang Kelas I B
3.	YULIA MARHAENA, S.H.	Hakim PN Kepahiang Kelas II	Hakim PN Lubuk Linggau Kelas I B
4.	YOSSO WIDIYANTORO EKO SAPUTRO	Jurusita PN Kepahiang Kelas II	Jurusita PN Tanjung Pinang

## D. PENSUN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		NIHIL	

## E. DIKLAT (SDM TEKNIS/NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT)

## a. Teknis

NO	NAMA	JABATAN	JENIS DIKLAT	PENYELENGGARA	TEMPAT
1	2	3	4		
			NIHIL		

## b. Non Teknis

NO	NAMA	JABATAN	JENIS DIKLAT	PENYELENGGARA	TEMPAT
1	2	3	4		

1.	TIA NURTHANA, S.Psi	CPNS	Seminar Rancangan Aktualisasi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Gol III	Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI	UPT Diklat BKPSDM Lubuklinggau
----	------------------------	------	--	--	--------------------------------------

## IV. PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

## A. PENGELOLAAN KEUANGAN

## 1. DIPA 01

KODE	URAIAN	DIPA AWAL	DIPA REVISI
1066	<i>Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi</i>	2.985.630.000	3.104.941.000
1066.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	30.540.000	30.540.000
1066.994	Layanan Perkantoran	2.955.090.000	3.074.401.00
1066.994.001	Gaji dan Tunjangan	2.200.649.000	2.239.356.000
	<b>Tambahan Belanja Gaji Pokok PNS</b>	-	<b>153.581.000</b>
1066.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	754.441.000	835.045.000
	<b>Tambahan Langganan Internet (BA.BUN)</b>	-	<b>48.104.000</b>
1071	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung</i>	13.000.00	109.000.000
1071.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	13.000.00	109.000.000
1071.951.054	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	-	83.000.00
	<b>Rehab Jaringan Listrik</b>	-	<b>83.000.00</b>

NO	KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN DIPA		
			PAGU (RP)	REALISASI (RP)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah	30.540.000	30.521.000	99,94
		Layanan Perkantoran	3.074.401.000	3.041.022.503	98.91
		- Gaji dan Tunjangan	2.239.356.000	2.228.812.392	99.53
		- Operasional dan Pemeliharaan Kantor	835.045.000	812.210.111	97.27
<b>Jumlah</b>			<b>3.074.401.000</b>	<b>3.041.022.503</b>	<b>98.91</b>
NO	KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN DIPA		
			PAGU (RP)	REALISASI (RP)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan	Layanan Internal	109.000.000		

NO	KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN DIPA		
			PAGU (RP)	REALISASI (RP)	%
1	2	3	4	5	6
	Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.000.000	108.940.000	99.94
Jumlah			109.000.000	108.940.000	99.94

### PNBP Umum

NO.	URAIAN JENIS PENDAPATAN/ MATA ANGGARAN PENERIMAAN		ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN	%
I	PENDAPATAN DARI PEMANFAATAN BMN				
	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1.680.000	1.680.000	100
JUMLAH TOTAL			1.680.000	1.680.000	100

### 2. DIPA 03

NO	KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN DIPA		
			PAGU (RP)	REALISASI (RP)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pos Bantuan Hukum	24.000.000	24.000.000	100
		Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	65.520.000	65.047.000	99.27
		Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	1.840.000	1.404.000	76.30
Jumlah			91.360.000	90.451.000	99.01

### PNBP Fungsional

NO.	URAIAN JENIS PENDAPATAN/ MATA ANGGARAN PENERIMAAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN	%
-----	---	---------------------	----------------------	---

NO.	URAIAN JENIS PENDAPATAN/ MATA ANGGARAN PENERIMAAN		ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN	%
I	PENDAPATAN KEJAKSAAN DAN PERADILAN SERTA GRATIFIKASI				
	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	150.000	40.000	26,66
	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	1.500.000	1.490.000	99,33
	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	2.000.000	1.798.300	89,91
	<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>3.650.000</b>	<b>3.328.300</b>	<b>91,18</b>

**B. SARANA DAN PRASARANA****1. Fasilitas Gedung**

NO	SARANA / PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Gedung</b>		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	2	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Panitera Muda Pidana	1	
6	Ruang Panitera Muda Perdata	1	
7	Ruang Panitera Muda Hukum	1	
8	Ruang Sekretaris	1	
9	Ruang Umum dan Keuangan	1	
10	Ruang Kepegawaian dan Ortala	1	
11	Ruang Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	
12	Ruang Sidang	3	
13	Ruang Mediasi dan Diversi	1	
14	Ruang Kaukus	1	
15	Ruang Penjara	2	
16	Ruang Posbakum	1	
17	Ruang Tunggu Anak	1	
18	Ruang Perpustakaan	1	
19	Ruang Server	1	
20	Ruang Arsip	2	
21	Ruang Toilet	10	
22	Ruang Barang Bukti	1	
23	Ruang Genset	1	
24	Ruang Disabilitas	1	
25	Ruang Tunggu Jaksa	1	
26	Ruang Tunggu Mediasi	1	
27	Ruang Tunggu Terbuka	1	
<b>II</b>	<b>Fasilitas Perkantoran</b>		
1	Komputer	26	
2	Printer	23	
3	Scanner	5	
4	Laptop	9	
5	Mini Computer	1	
6	PABX	1	
7	Air Conditioner	15	
8	Brankas	2	
9	Faximile	1	
10	Finger Print	1	

NO	SARANA / PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
11	Server	2	
12	Router	1	
13	Hub	1	
14	Camera Digital	1	
15	TV	2	
16	CCTV	16	
17	Genset	1	
18	Lambang Instansi	1	
19	Lemari Kayu	32	
20	Rak Kayu	8	
21	Publik Astari	2	
22	Meja Kerja Kayu	33	
23	Meja Rapat	1	
24	Meja Resepsionis	2	
25	Sice	6	
26	Kursi Besi/Metal	72	
27	Kursi Zeis	10	
28	Kursi Kayu	23	

## 2. Aset Tanah

NO	TANAH	LUAS (m2)	BUKTI KEPEMILIKAN	LOKASI
1	2	3	4	4
1	Tanah Gedung Kantor	9.650	000028/06-01-2011	Jl. Aipda Muán Komplek Perkantoran Pembkab Kepahiang Kel. Pelangkian Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang
2	Tanah Eks. PN Kepahiang	1.000	07.07.01.02.4.00004/01- 11-2011	Jl. Pembangunan Kelurahan Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang

## 3. Aset Bangunan

NO	BANGUNAN	LUAS (m2)	DI BANGUN TAHUN	LOKASI
1	2	3	4	4
1	Gedung Kantor PN Kepahiang	9.650	2011	Jl. Aipda Muán Komplek Perkantoran



NO	BANGUNAN	LUAS (m2)	DI BANGUN TAHUN	LOKASI
1	2	3		4
				Pemkab Kepahiang Kel. Pelangkian Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang
2	Gedung Eks. Kantor PN Kepahiang	620	1982	Jl. Pembangunan Kelurahan Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang
3	Ruang Barang Bukti	296	2015	Jl. Aipda Muán Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang Kel. Pelangkian Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang
4	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya (Ruang Genset)	12	2017	Jl. Aipda Muán Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang Kel. Pelangkian Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang
5	Gedung Pos Jaga Permanen	36	2015	Jl. Aipda Muán Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang Kel. Pelangkian Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang
6	Musholla	12	2019	Jl. Aipda Muán Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang Kel. Pelangkian Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang

**4. KENDARAAN DINAS**

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Jenis Kendaraan Roda 4</b>					
1.	Toyota Innova	2009	Baik	-	-	Penyerahan dari MA
2.	Toyota Fortuner	2015	Baik	-	-	Pinjam Pakai Pemda Kepahiang
3.	Toyota Avanza	2018	Baik	-	-	Pinjam Pakai Pemda Kepahiang
4.	Suzuki APV	2019	Baik	-	-	Pinjam Pakai Pemda Kepahiang
<b>II</b>	<b>Jenis Kendaraan Roda 2</b>					
1.	Yamaha Jupiter	2015	Baik	-	-	Milik Sendiri
2.	Yamaha Jupiter	2015	Baik	-	-	Milik Sendiri
3.	Yamaha Jupiter	2013	Baik	-	-	Milik Sendiri
4.	Yamaha Jupiter	2013	Baik	-	-	Milik Sendiri

**5. RUMAH DINAS**

Pengadilan Negeri Kepahiang belum memiliki Rumah Dinas.

V. Peningkatan Pelayanan Publik

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

